RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA BOGOR TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2017

Kata Pengantar

PujidanSyukurkitapanjatkankehadiratAlloh SWT karenaatasberkatdanRahmat-Nya, penyusunanRencanaKerjaBappeda Kota BogorTahun 2018telahdapatdiselesaikansebagaimanadiamanatkandalamUndangUndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan NasionalsertaPeraturan Daerah Kota Bogor No 7 Tahun 2008 sebagaimanatelahdiubahdenganPerda No 5 tahun 2009 tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan sertaMusyawarahPerencanaan Pembangunan Daerah.

PenyusunanRencanaKerjaBappedaTahun 2018inidimaksudkansebagaipedomanbagipelaksanaankegiatanuntukmenjagakesinambungandansinergitaskegiatansehinggadapatsecarakonstruktifmendukung proses pembangunan di Kota Bogor.

Pemahaman yang cermatterhadap program-program prioritasdanisu-isustrategisPemerintah Kota Bogormaupunlangkah-langkah yang diperlukan, akanmenghasilkanRencanaKerja yang bukansajalebihberkualitasdanimplementatif, tetapilebihjauhlagiakanbermanfaatbagipenyusunanlangkahantisipatifsehinggaperencanaan yang dihasilkanmenjadisinergisdantepatsasaran.

RencanaKerjaBappeda Kota Bogor Tahun 2018disusundenganberpedomankepadaRenstraBappedadanmengacukepada

RKPD Kota Bogoryangmemuatkebijakan Program dankegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakanlangsungolehPemerintah Daerah maupun yang ditempuhdenganmendorongpartisipasimasyarakat.

Padakesempatanyang baikini, kami menyampaikanucapanterimakasihkepada Tim PenyusunRencanaKerja yang telahmaksimalmencurahkantenagadanwaktudalammenyusunRencanaKerjaBappeda Kota BogorTahun 2018ini. SemogaRencanaKerjainibermanfaatdandapatdipergunakansebagaiacuandalam melaksanakankegiatan di Tahun 2018dalamrangkamendukungterwujudnyaVisiBappedasebagaiperencanaprofesionaldanakuntabeldalammendukung *"Lembaga Perencanaan Daerah yang Partisipatif dalam mendukung Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan"*.

Bogor, Maret2017

KEPALA

Ir. ERNA HERNAWATI, MM.,MBA
Pembina Utama Muda

NIP. 19621208 199203 2 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuandalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah(RPJMD) dan Renstra OPD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogormerupakan badan yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah,termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan.

Prioritas Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2018 diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, , Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,Program Pengembangan Data dan Informasi, Program Perencanaan Sosial Budaya, Program Penelitian Pengembangan, Program Kerjasama Pembangunan,Program Perencanaan Prasarana ilayah dan Sumber daya alam, Program pengendalian Pembangunan Daerah dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016serta sasaran pelaksanaanTahun 2017.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2018berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RenjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11) Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
12) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah;

13) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
15) Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Seri D);
16) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019;
17) Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.340 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
18) Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.341 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
19) Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.342 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan;
20) Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.425 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar;
21) Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.426 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan;
22) Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.427 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
23) Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.428 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;

24) Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.429 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja Beppeda Kota Bogor selama Tahun 2018 berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2018 berupa rencana kinerja yang mencakup rencana capaian kinerja Tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2016 dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda,
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2016 dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Bappeda Kota Bogor sebagai badan perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan warga kota.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor pada Tahun 2016 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.

Program - program yang dilaksanakan Bappeda Kota Bogor sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Penelitian dan Pengembangan

5. Program Perencanaan Tata Ruang
6. Program Pengendalian PemanfaatanRuang
7. Program Perencanaan Sarana Prasarana Kota
8. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
9. Program Pengembangan Data dan Informasi
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Perencanaan Sosial Budaya
12. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda

Bappeda Kota Bogor pada tahun 2016 telah melaksanakan 14 (empatbelas) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

   Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan :

   - Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

   Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD dilaksanakan selama dua triwulan atau 6 (enam) bulan dari bulan Januari sampai dengan Maret dan Oktober sampai dengan Desember 2016. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan Laporan Kinerja Bappeda Kota Bogor dengan agenda kegiatan berupa :

   1. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen
   2. Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen
   3. Penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lingkup Bappeda Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen
   4. Penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen

5. Penyusunan dokumen Laporan Tahunan 2016 sebanyak 1 dokumen.

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.833.987,00target kinerja 100% tercapai.

2. Program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

Program ini memiliki peran dalam upaya mewujudkan tata kelola sarana prasarana aparatur yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah :

a. Pengadaan Inventaris Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk Terpenuhinya sarana dan prasarana Inventaris Kantor dilingkungan Bappeda Kota Bogor, dalam rangka meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas rutinitas, kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 1.045.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.027.563.750,- (98.33%).

b. Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk Terpeliharanya sarana dan prasarana Inventaris Kantor dilingkungan Bappeda Kota Bogor, kegiatan dimaksud dianggarkan sebesar Rp. 940.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 926.310.000,- (98,54)

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga OPD

Kegiatan ini bertujuan untuk Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pada Bappeda Kota Bogor, dalam rangka meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas rutinitas, kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 933.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 891.561.943,- (95.56%).

4. Program Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja program ini berupa tingkat penyusunan dokumen penelitian pengembangan yang pada tahun 2016 dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Kegiatan ini merupakan amanah dari Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 tahun 2012 dan No. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Sosialisasi *Roadmap* Penguatan SIDa dengan jumlah peserta 130 orang terdiri dari unsur Kelurahan, Kecamatan, akademisi,pelaku usaha, dan komunitas SIDa, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016, di Hotel Royal Bogor.
- Penyusunan Peraturan Walikota Bogor tentang Roadmap penguatan SIDa dan terbentuknya Tim koordinasi SIDa.

Adapun hasil dari kegiatan sosialisasi antara lain :

- Peserta mengetahui dasar hukum penyelenggaran SIDa
- Peserta memahami danmengerti kedudukan SIDa bagi sektor pemerintah, pelaku usaha, akademi dan komunitas
- Peserta mengetahui jalur-jalur pengembangan hasil inovasi
- Peserta mulai mengenal inovasi-inovasi yang ada di Kota Bogor dan yang ada di Propinsi Jawa Barat
- Peserta terinspirasi untuk selalu berinovasi dari berbagai sektor dan mempublikasikannya.

Yang menjadi narasumber pada sosialisasi ini adalah :

- Kepala Pusat Inovasi Daerah BPP Kemendagri RI
- Direktur Inovasi Daerah Kemenristek Dikti RI
- Direktur Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara RI
- Kepala Bidang Inovasi Daerah BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat
- Kepala Bidang Ekonomi dan Litbang Bappeda Kota Bogor
- Inovator bidang kesenian dan pariwisata Kota Bogor pemenang inovator bidang pariwisata dari Kementrian Pariwisata RI Sanggar Etna Daya Sora

Peraturan Walikota tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah telah terbit nomor perwali : No. 43 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Walikota Nomor :. 050.45-223 Tahun 2016 Tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Sistem Inovasi Daerah Kota Bogor. Anggaran Rp. 216.000.000,- yang dapat direalisasi Rp. 198.008.212,- (91,67%)

b. Sosialisasi Kajian – kajian Perencanaan

Kegiatan sosialisasai kajian-kajian perencana merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan beberapa produk hasil kajian yang telah disusun oleh Bappeda Kota Bogor diantaranya adalah tentang :

a. Sosialisasi Kajian Hibah untuk bantuan modal usaha ekonomi dengan peserta 100 orang yang diselenggarakan di Hotel Royal Kota Bogor pada tanggal 23

Maret 2016 dengan peserta para lurah dan para Camat se Kota Bogor dan OPD terkait se Kota Bogor,dengan hasil :

- Peserta memahami dasar hukum penyaluran hibah bagi usaha ekonomi
- Peserta mengetahui prosedur dan tata cara permohonan pengajuan hibah bagi usahaekonomi .
- Peserta memahami peran dan tugasnya dalam proses pengajuan hibah bagi usaha ekonomi
- Peserta dari OPD diberikan kewajiban untuk melaksanakan verifikasi ajuan.

Yang menjadi nara sumber pada acara sosialisasi kajian hibah untuk bantuan modal ekonomi ;

- Sekretaris Bappeda Kota Bogor
- Kepala Bidang Ekonomi dan Litbang Kota Bogor
- Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setdakot Bogor
- Kabag Administarasi Pemerintahan Umum Setdakot Bogor
- Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah

b. Sosialisasi Kajian Kesiapan Kota Bogor dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diselenggarakan di Hotel Pangrango II Kota Bogor, pada tanggal 26 September 2016 dengan jumlah peserta 80 orang dari unsur para pengrajin, para Pelaku Usaha, komunitas dan OPD terkait se Kota Bogor dengan hasil :

- Peserta mengetahui hasil kajian kesiapan Kota Bogor dalam menghadapi MEA
- Peserta mengetahui strategi Indonesia dalam MEA
- Peserta engetahui strategi meningkatkan kualitas sumeber daya manusia dalam MEA
- Peserta memahami kesiapan Kota Bogor menghadapi MEA, peluang dan tantangan bagi UKM dan IKM Kota Bogor, potensi, produk unggulan dan investigasi peluang pasar Kota Bogor dalam menghadapi MEA

Yang menjadi nara sumber pada sosialisasi ini adalah :

- Kepala Bappeda Kota Bogor
- Direktur MEA Center Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional Kementrian Perdagangan RI

- Direktur Pengembangan Pasar Kerja Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Kementrian Tenaga Kerja RI
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor
- Kantor Koperasi dan UKM Kota Bogor

c. Sosialisasi Kajian Klaster Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan di Hotel Permata Kota Bogor pada tanggal 14 Desember 2016dengan jumlah peserta 100 orang terdiri dari OPD se Kota Komunitas, dan para pelaku ekonomi kreatif se Kota Bogor, dengan hasil sebagai berikut :

- Peserta memahami tentang kajian klaster ekonomi kreatif
- Peserta mengetahui latar belakang dan landasan terjadinya ekonomi kreatif
- Peserta mengetahui program kerja Badan Ekraf RI
- Peserta memahami bahwa ekonomi kreatif adalah potensi pariwisata dan geliat riset pengembangan ekraf.

Yang menjadi nara sumber pada sosialisasi ini adalah :

- Kepala Bidang Ekonomi dan Litbang Bappeda Kota Bogor
- Direktur Riset dan Pengembangan ekonomi Kreatif Badan Ekraf RI
- Deputi fasiitasi Hak kekayaan intelektual dan reghulasi Badan Ekraf RI
- Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Badan Ekraf RI
- Kepala Dinas Pariwisata , Budaya dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor.

Anggaran Rp. 200.000.000,- yang direalisasi Rp. 186.733.165,- (93,37%).

5. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor dengan maksud untuk melaksanakan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031. Tujuan kegiatan ini adalah menilai kinerja RTRW Kota Bogor sebagai dasar untuk dilakukannya revisi RTRW. Peninjauan kembali ini merupakan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa RTRW dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.Pertimbangan peninjauan kembali RTRW didasarkan atas berkembangnya dinamika pembangunan Kota Bogor selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak disusunnya RTRW. Adapun output kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Evaluasi RTRW Kota Bogor 2011-2031, dengan hasil evaluasi sebagai berikut ini.

Tabel

Persentase Tingkat Kualitas RTRW, Tingkat Kesahihan RTRW, dan Tingkat Permasalahan Pemanfaatan Ruang

No	Objek	Variabel	Penilaian		Keterangan
1	Kualitas RTRW	Kelengkapan muatan RTRW tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang rencana struktur ruang wilayah rencana pola ruang wilayah penetapan kawasan strategis arahan pemanfaatan ruang arahan pengendalian pemanfaatan ruang	25%	Lengkap	RTRW Kota Bogor sudah mengacu pada pedoman no 17/PRT/M/2009 Terdapat perubahan dinamika eksternal yang mempengaruhi perkembangan kota bogor dan belum diantisipasi dalam RTRW
		Kedalaman pengaturan muatan RTRW mengacu pada permen PU no 17/PRT/M/2009	25%	Sesuai dengan pedoman	
		Kesesuaian antara muatan RTRW dan karakteristik daerah	25%	Sesuai dengan pedoman	
		Kesesuaian antara RTRW dan dinamika pembangunan yang berkembang	20%	Sesuai dengan pedoman	
2	Kesahihan RTRW	Kesesuaian dengan peraturan perundangan yang terkait	80%	Sesuai	Dalam pelaksanaan RTRW 5 tahun pertama terdapat perubahan peraturan sektoral yang berpengaruh terhadap RTRW
3	Simpangan pemanfaatan Ruang	Kesesuaian antara RTRW dan pemanfaatan ruang di lapangan	84%	Sesuai	Simpangan pemanfaatan ruang dinilai berdasarkan muatan RTRW (tabel 7.2)

Sumber : Laporan Evaluasi RTRW Kota Bogor 2011-2031 (2016)

Tabel

Persentase Perubahan Materi Muatan RTRW Kota Bogor

No.	Materi Muatan		Bobot Maksimum	Penilaian Kinerja	Perubahan	Keterangan
1.	Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang		15 %	15 %	0 %	**Tidak berubah**
2.	Rencana Struktur Ruang Wilayah		20 %	17 %	2 %	
	2.1.	**Sistem Pusat Permukiman**	**5%**	**5%**	**0%**	**WP tidak berubah, perlu ada penyesuaian kembali waktu pencapaian WP**
	2.2.	**Sistem Jaringan Prasarana**	**15%**	**13%**	**2%**	**Adanya kebijakan baru terkait transportasi, rencana jaringan jalan baru terlaksana sebagian dan perubahan rencana pelayanan infrastruktur sektoral**
3.	Rencana Pola Ruang Wilayah		40 %	25 %	7 %	
	3.1.	**Kawasan Lindung**	**15%**	**10%**	**2%**	**Terdapat beberapa data baru yang lebih akurat, dan penyesuaian waktu pelaksanaan**
	3.2.	**Kawasan Budi Daya**	**25%**	**20%**	**5%**	**Kebutuhan pola ruang guna**

No.	Materi Muatan		Bobot Maksimum	Penilaian Kinerja	Perubahan	Keterangan
						campuran, perdagangan dan jasa
4.	Penetapan Kawasan Strategis		5 %	5 %	0	Tidak ada perubahan
5.	Arahan Pemanfaatan Ruang		10 %	5 %	5 %	
	5.1.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang	5%	3%	2%	Target terlaksana sebagian, karena adanya kendala
	5.2.	Perwujudan Rencana Pola Ruang	5%	3%	2%	Target terlaksana sebagian karena adanya kendala
	5.3.	Perwujudan Kawasan Strategis	5	4%	1%	Target terlaksana sebagian, karena adanya kendala
6.	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		5 %	5 %	0	Tidak berubah, namun perlu didetilkan
	TOTAL		100 %	86 %	14 %	

Sumber : Laporan Evaluasi RTRW Kota Bogor 2011-2031 (2016)

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas, perubahan/simpangan materi muatan RTRW Kota Bogor adalah sebesar 14% yang berarti pada tahun 2017 perlu dipertimbangankan untuk dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011, namun demikian jangka waktu rencana tidak berubah yakni sampai tahun 2031. Adapun rekomendasi perubahan muatan materi RTRW berdasarkan hasil penilaian diatas adalah sebagai berikut :

a) Rencana Struktur Ruang :
   - Pemantapan pusat-pusat permukiman berdasarkan masukan dari penyusunan RDTR 5 WP Kota Bogor
   - Penyesuaian rencana struktur ruang terhadap perubahan dan penambahan pusat aktifitas baru berupa integrasi jaringan prasarana tanpa mengubah sistem pusatpermukiman

b) Rencana Pola Ruang :
   - Penyesuaian pola ruang berdasarkan koreksi peta hasil FGD dan hasil analisis penentuan kuota RTH per WP
   - Integrasi arahan pola ruang berdasarkan rencana sektoral yang disusun setelah RTRW ditetapkan

c) Arahan pemanfaatan Ruang :

- Penyusunan secara lebih rinciindikasi program 5 tahun kedua dengan mempertimbangkan indikasiprogram yang belum berjalan pada 5 tahun pertama
- Sinkronisasi program sektoral dengan dinas-dinas terkait yang menyangkut tahapan pelaksanaan dan jenis program

Berdasarkan Tabel pencapaian indikator kinerja di atas, menunjukkan bahwa pada umumnya target tercapai kecuali rencana rinci tata ruang atau kawasan, dikarenakan pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi RTRW. Anggaran Rp. 461.570.000,- yang direalisasikan Rp. 448.211.640,- (97,11%).

b. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik ini merupakan bagian dari

No	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian Output
1	Penyelenggaraan Sosialisasi Air Limbah Domestik	3 Kali	3 Kali	100%
2	Site Plan Kawasan Infrastruktur Terpadu Kayu Manis	3 Berkas	3 Berkas	100%

Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana. Indikator capaian program adalah tercapainya tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarana sebesar 40%. Sedangkan indikator target dan realisasi output kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

3	Pengembangan wawasan tentang air limbah domestik	1 Kali	1 Kali	100%

Sosialisasi Air Limbah Domestik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat Kelurahan Kayu Manis mengenai instalasi pengolahan air limbah domestik serta infrastruktur terpadu di Kelurahan Kayu Manis. Sosialisasi telah terselenggara sebanyak 3 kali di Aula Kelurahan Kayumanis dengan melibatkan aparat kelurahan,pengurus RT, pengurus RW serta tokoh masyarakat setempat.

Kemudian melalui kegiatan ini telah dihasilkan Perencanaan Siteplan Kawasan Infrastruktur Terpadu Kelurahan Kayu Manis, yang luasnya sebesar± 12 Ha tersebut,yang peruntukkannya terdiri dari:

1. **Fasilitas pengelolaan lingkungan** meliputi tapak instalasi pengolahan air limbah domestik,tempat pengelolaan sampah 3R (TPS 3R), pengolahan minyak jelantah,bank sampah dan rumah kompos;
2. **Sarana edukasi** meliputi bumi perkemahan serta fasilitas penunjang lainnya berupa lapangan terbuka,sarana latihan ruang terbuka(outbond),sarana olahraga serta tempat ibadah (mesjid).

Hasil lain dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan wawasan ke instalasi pengolahan air limbah Suwung di Bali dengan peserta 13 orang yang dari unsur Bappeda , BPLH, Dinas Wasbangkim, DKP, Dinas Kesehatan,Bagian Hukum Setda, Camat Tanah Sareal dan Lurah Kayumanis.Hasil dari pengembangan wawasan tersebut adalah kita dapat mengetahui bagaimanapenyusunan kelembagaan serta cara pengelolaan teknis instalasi pengolahan air limbah domestik, sedangkan sosialisasi ke masyarakat dilakukan dengan pendekatan pada tokoh masyarakat dan agama. Anggaran Rp. 150.000.000,- yang direalisasikan Rp. 145.727.000,- (97,15%).

6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran RPJMDyakni meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang. Berdasarkan RPJMD 2015-2019, program ini memiliki7 (tujuh) indikator kinerja yakni persentase keterlaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, persentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan dilapangan, persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin, persentase tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang, persentase jumlah regulasi penataan ruang (perda/perwali), tingkat kesesuaian antara PSU dengan perizinan serta jumlah PSU yang diserahkan pengembang.Adapun target dan capaian indikator kinerja program yang menjadi tugas pokok Bappeda berikut realisasi kegiatan pendukungnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang	Persentase keterlaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang (%)	40%	40%	100%

Indikator Kinerja dihitung dari keterlaksanaan kegiatan program pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator kinerja tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Penataan Ruang

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Koordinasi Penataan Ruang ini adalah untuk memfasilitasi koordinasi penataan ruang di Kota Bogor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bogor yang beranggotakan pimpinan daerah dan OPD

terkait penataan ruang di Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan berupa rapat koordinasi yang membahas masalah perencanaan pelaksanaan dan pengendalian tata ruang yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembilan kebijakan. Pada tahun 2016 topik bahasan rapat BKPRD meliputi :

a) Rencana pembangunan Olympic City
b) Perizinan klinik
c) Pengawasan bangunan
d) Pembangunan rumah sakit geriatri
e) Sosialisasi revisi RTRW
f) Pembangunan Mall dan Rumah Sakit eks Pangrango Plaza
g) Pembangunan pertokoan Jl. Empang
h) Izin Usaha Toko Modern
i) Relokasi pembebasan lahan Jl Tol Bocimi
j) Alih fungsi Restoran menjadi Condotel
k) Pembangunan rusunawa
l) Pembangunan STIE GICI
m) Perluasan Kampus Akademi Kimia Analis
n) Pembangunan Mesjid Imam Ahmad Bin Hamdal
o) Perubahan Fungsi sebagian Ruko menjadi Hotel (Jl. Pangeran Sogiri)
p) Pembangunan Hotel & Resort (ex. Bostinco)
q) Pembangunan Kios / Pertokoan di Kawasan Aset PT. KAI
r) Pembangunan Rumah Kost
s) Perpanjangan Perizinan PAUD Formal
t) Pembangunan Rumah Sakit di Jl. Ahmad Yani
u) Rencana Pembangunan Apartemen di Jl. Salak

Dari ke-21 topik tersebut, pada umumnya membahas terkait aturan zonasi untuk usulan kegiatan, mengingat saat ini RTRW Kota Bogor bukan alat pengendali pemanfaatan ruang sehingga tidak memuat aturan zonasi. Aturan zonasi masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman, yang pengesahannya setelah pengesahan Peraturan Daerah Revisi RTRW yang akan dilaksanakan tahun 2017. Sehingga saat ini diperlukan aturan transisi terkait peraturan zonasi dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada kegiatan ini pula dilaksanakan koordinasi terkait program Kota Pusaka khususnya memfasilitasi koordinasi pembangunan Lawang Suryakecana dan Tepas Salapan Lawang Dasakreta, yang pembangunannya dilaksanakan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tepas Salapan Lawang Dasakreta yang terletak di sebelah Tugu Kujang diresmikan oleh Bapak Walikota Bogor dan dihadiri Bapak Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 7 Desember 2016. Kedua tegaran baru Kota Bogor ini telah menjadi obyek wisata baru Kota Bogor, selain sebagai penanda Kawasan Pusaka Kota Bogor. Anggaran Rp. 274.800.000,- yang direalisasikan Rp. 233.194.818,- (84,86%).

b. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Ruang (SIP3R)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. SIP3R ini merupakan alat bantu mengintegrasikan tugas antar OPD terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang teridiri dari peraturan zonasi, perijinan, pengawasan dan penindakan. Tujuan untuk kegiatan ini adalah mengelola dan memelihara baik perangkat lunak maupun perangkat keras SIP3R.Padakegiataninidilaksanakanpemeliharaan server, testing kehandalan koneksi sistem, integrasi dan interoperabilitas SIP3R dengan sistem informasi perijinan SMART BPPTPM danpelatihan pagi OPD pengguna yakni Bappeda, BPPTPM, Diswasbangkim dan Satpol PP. Adapun hasilnya adalah terpeliharanya perangkat lunak dan keras SIP3R, serta terhubungnya SIP3R dengan SMART serta terlatihnya OPD pengguna. Dengan terhubungnya kedua aplikasi ini, tercipta satu data obyek perijinan dan tahun 2017 aplikasi ini siap untuk digunakan. Anggaran Rp. 187.940.00,- yang direalisasikan Rp. 177.255.457,- (94,31%).

7. PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA

Program Perencanaan Sarana Prasarana Kota yang merupakan bagian dari Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung misi III RPJMD 2015-2019 yaitu menjadikan Bogor Kota yang berwawasan lingkungan melalui penerapan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana kota selain mencakup prasarana persampahan juga menyangkut prasarana jalan, sanitasi, air bersih, drainase,

pasar, terminal dan lain sebagainya yang merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi dan perencanaan yang matang menyangkut penyediaan sarana prasarana kota sangat membutuhkan keterlibatan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat mengingat kemampuan pemerintah untuk menyediakan sarana/prasarana/fasilitas seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang ada (SDM, anggaran, dll).

Indikator kinerja program ini pada tahun 2016 adalah tersedianya dokumen perencanaan sarana dan prasarana perkotaan sebanyak 2 dokumen. Target tersebut telah terlampaui dengan dihasilkannya 3 dokumen yaitu Dokumen Strategi Sanitasi Kota, Dokumen Review Masterplan Persampahan, dan Dokumen Review Masterplan Drainase (4 Zona Drainase), sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel
Program Perencanaan Sarana Prasarana Kota

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah dokumen perencanaan sarana prasarana perkotaan	2 dokumen	3 dokumen	150%

Pencapaian target indikator program tersebut diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan antara lain:

a. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Kota

Kegiatan fasilitasi koordinasi perencanaan sarana dan prasarana kota bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi perencanaan sarana dan prasarana kota yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan rapat–rapat

kelompok kerja (pokja) sanitasi, pokja perumahan dan permukiman, pokja transportasi, pokja RPIJM Kota Bogor serta penyelenggaraan sanitasi award.

Adapun indicator kinerja output serta realisasinya dapat dilihat pada table berikut ini :

Indikator Kinerja Output	Target	Realisasi	Capaian
Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2016 melalui kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota ini adalah:

a) **Rapat-rapat Pokja Sanitasi**yang menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan sanitasi dan air bersih di Kota Bogor.
Pokja ini melakukan penyempurnaan terhadap **Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)** untuk memberikan arah bagi pengembangan sanitasi diKota Bogor. Ini dilakukan mengingat adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target *Universal Acces* di tahun 2019.

b) **Rapat-rapat Pokja Perumahan dan Permukiman**yang menghasilkan dokumen perencanaan kawasan kumuh Kota Bogor.
Pokja ini melakukan penyempurnaan terhadap profil kawasan kumuh di Kota Bogor dan bersama-sama dengan tim KOTAKU menyusun perencanaan penanganan kawasan kumuh.

c) **Rapat-rapat Pokja RPIJM** menghasilkan Dokumen RPIJM Kota Bogor Tahun 2016

d) **Terselenggaranya Sanitasi Award Tahun 2016**.
Sanitasi award diselenggarakan oleh Bappeda bekerjasama dengan Aksansi Pusat (dalam memberikan panduan aspek-aspek atau materi penilaian), Aksansi Kota Bogor dan Forum Kota Sehat.Tim jurinya terdiri dari Bappeda, BPLH, Dinas Kesehatan, Diswasbangkim, Aksansi Kota dan Forum Kota Sehat.Pesertanya adalah KSM pengelola sanitasi se Kota Bogor. Adapun pemenangnya adalah sebagai berikut :

Juara I KSM Cipendek Indah
Juara II KSM Amanah
Juara III KSM Al Islah
Juara Harapan I KSM Mawar Bodas
Juara Harapan II KSM Kalibiru Timur 3
Juara Harapan III KSM Cilibende

e) Terselenggaranya Kegiatan City Sanitation Summit (CSS) Tahun 2016.

CSS XVI di Banda Aceh diikuti oleh 55 Walikota/Bupati se Indonesia yang merupakan anggota AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi).

Dalam CSS tersebut yang menjadi komitmen bersama adalah koordinasi dan monitoring rutin terhadap progress pembangunan sanitasi, membentuk Gerakan Sanitasi Terpadu Lintas Organisasi, meningkatkan peran operator dan regulator dalam penanganan air limbah serta mendorong keberlangsungan siklus bisnis persampahan didaerah.

Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan Sanipura Award kepada Walikota Bogor sebagai salah satu kota dari 10 kabupaten/kota peraih Sanipura Award dengan kategori Pengelola Database Sanitasi melalui ppsp.nawasis.info. Anggaran Rp. 374.800.000,- yang direalisasikan Rp. 376.868.010,- (79,61%).

b. Review Masterplan Drainase

Urusan Sarana Prasarana Kota dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya, Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019, urusan ini dijabarkan menjadi 2 (dua) program yakni Program Perencanaan Sarana Prasarana Kota dan Program Pengembangan Data dan Informasi. Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Rincian program yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran RPJMD yakni tersusunnya kebijakan konservasi sumber daya air. Berdasarkan RPJMD 2015-2019, program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yakni terdiri dari Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Adapun target dan capaian indikator kinerja program berikut realisasi kegiatan pendukungnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah dokumen perencanaan sarana prasarana perkotaan	1Dok	1Dok	100%

Tabel Rencana Zona Penanganan Drainase Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasisumber daya alam	Jumlah Situ/Danau/Kolam Retensi Berkondisi Baik	15 zona	10 zona	67%

Pencapaian indikator kinerja tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- **Review Masterplan Drainase Tahun 2016**

  Pada tahun 2007 sudah dilakukan kegiatan penyusunan Masterplan Drainase yang berisikan 15 Zona dari sungai dan anak sungai, kemudian pada tahun 2013 dilakukan outline plan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor yang menghasilkan beberapa penjelasan detail mengenai penanganan banjir dan pembangunan saluran drainase. Lalu pada tahun 2014 dilakukan Review Masterplan Drainase pada Bappeda Kota Bogor dan menghasilkan dokumen

hingga laporan pendahuluan, sehingga perlu dilanjutkan dalam review Masterplan Drainase pada tahun 2016 lanjutan.

Sasaran dalam Perumusan Masterplan Drainase Kota Bogor diharapkan dapat berfungsi sebagai :

1) Penjabaran kebutuhan sistem drainase sesuai RTRW Kota Bogor;
2) Tersusunnya acuan dasar dalam perencanaan teknis saluran dan bangunan drainase mayor (makro) yang meliputi saluran primer (Ciliwung-Cisadane), sekunder (anak sungai Ciliwung-Cisadane/zona berdasarkan DAS) dan tersier;
3) Tersusunnya acuan dasar dalam perencanaan sistem drainase Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder, dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase permukiman, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya;
4) Melakukan Revisi Masterplan Drainase Kota Bogor,khususnya diwilayah pelayanan drainase zona 12,13,14 dan 15
5) Mengevaluasi semua kajian dan menganalisis semua laporan yang berhubungan, peta, informasi baik yang berhubungan dengan kebijakan berskala nasional, regional maupun lokal, strategi dan rencana untuk drainase perkotaan yang termasuk dalam pembangunan perkotaan terintegrasi di Kota Bogor.

Adapun output kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Review Masterplan Drainase Tahun 2016, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut ini:

Identifikasi Permasalahan Spesifik Drainase Kota Bogor

I. Berdasarkan pengamatan lapangan dan referensi laporan & kajian, artikel dan informasi sumber lainnya, diidentifikasikan terdapat beberapa permasalahan dan faktor penyebab yang terkait dengan kondisi sistem drainase di kota Bogor saat ini, yaitu antara lain :

   a) Belum terintegrasinya sistem drainase satu wilayah dengan wilayah lain disekitarnya.
   b) Meningkatnya intensitas curah hujan
   c) Pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro.
   d) Berubah fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, khususnya di kawasan Bogor Utara.
   e) Mix Drain,

II. Mengidentifikasi lokasi genangan yang sering terjadi dan menentukan deskripsi penyebabnya sehingga bisa disusun prioritas penanganan berdasarkan kategori resiko.

III. Penerapan Konsepsi pembuatan sumur resapan air hujan dengan mengacu kepada SNI 03-2453-2002 dan SNI 06-2459-2002 mengenai tata cara dan spesifikasi perencanaan sumur resapan untuk lahan pekarangan.

IV. Berubahnya fungsi lahan, sehingga persentase area tangkapan (catchment area) berkurang.

V. Perlunya penambahan kolam-kolam retensi sebagai area filter volume air dan sumber air untuk kebutuhan area perkotaan.

Dari kajian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan :

- Terjadi peningkatan curah hujan rata-rata harian maksimum dari kurun waktu tahun 1992 – 2007 hingga tahun 2007 – 2015. Peningkatan terjadi sebesar 8.7 % dari rata – rata 120.21 mm menjadi 131.67 mm. Peningkatan curah hujan dan sistem drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, sehingga dengan semakin meningkatnya curah hujan diperlukan perencanaan sistem drainase yang tidak hanya mengandalkan kapasitas saluran sebagai upaya mengalirkan dan membuang secepatnya limpasan air hujan, tetapi dengan mengaplikasikan prinsip drainase lingkungan yang mengutamakan pemanfaatan air sebesar-besarnya
- Penentuan zona drainase terdahulu dilakukan secara manual dengan garis kontur 5 m, dalam review masterplan kali ini dilakukan pembagian zona drainase kembali berdasarkan sungai-sungai yang ada pada wilayah kota bogor. Pembagian zona didapatkan dari data kontur setiap dua meter yang didapatkan dari hasil survey. Perbaikan zona drainase dilakukan dengan menggunakan kontur yang lebih rapat (2 m) dan delineasi menggunakan bantuan software ArcSWAT.
- Terjadi perubahan besar koefisien pengaliran dari hasil analisa masterplan 2007 dengan analisa sekarang. Perubahan cenderung meningkat dari nilai sebelumnya.
- Secara garis besar, penyusunan sistem jaringan drainase di Kota Bogor tetap direkomendasikan untuk mengikuti rencana pada masterplan tahun 2007. Mayoritas dari drainase yang direncanakan mengikuti jaringan jalan eksisting

untuk mempermudah konstruksi serta akses dalam melakukan perawatan dan perbaikan apabila diperlukan. Dari hasil tinjauan ke lapangan, masih terdapat ruas-ruas jalan yang belum dilengkapi dengan saluran drainase yang memadai. Kriteria desain yang harus digunakan dalam perencanaan drainase di atas adalah sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam masterplan drainase kota bogor 2007.

- Paradigma baru penanganan masalah drainase perkotaan tidak terbatas pada upaya mengalirkan dan membuang secepatnya (kelebihan air permukaan / limpasan air hujan) menuju badan – badan air terdekat. Namun lebih dari itu penatagunaan sistem drainase perkotaan bertujuan konservasi sumber daya air dan kehidupan aquatik. Mencakup optimalisasi upaya mengendalikan luapan dan genangan banjir serta meresapkan kelebihan air tersebut untuk imbuhan persediaan air baku (air permukaan maupun air tanah).
- Selain mengatasi permasalahan drainase kota Bogor dalam bidang infrastruktur, penanganan juga dilakukan dengan menegakkan regulasi-regulasi yang sudah ada.

  Anggaran Rp. 513.600.000,- yang direalisaikan Rp. 463.300.915,- (90,21%).

c. Review Masterplan Persampahan

Pada tahun 2008, Kota Bogor telah menyusun Masterplan Persampahan. Seiring dinamika kependudukan dan perubahan kebijakan di tingkat pusat dan daerah dipandang perlu untuk adanya review terhadap masterplan persampahan yang telah ada tersebut. Secara spesifik hal-hal yang menyebabkan perlunya dilakukan review terhadap masterplan persampahan tahun 2008 adalah :

a. penanganan sampah masih menggunakan paradigma lama, yaitu menimbun sampah bukan mengelola sampah.

b. menghitung jenis dan jumlah timbulan sampah hanya berdasarkan asumsi saja,

c. belum menyertakan peran serta masyarakat secara konkrit,

d. pelayanan persampahan masih terpusat skala kota belum skala kawasan,

Harapannya dokumen review masterplan ini dapat dijadikan sebagai pedoman/panduan bagi pemerintah,swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah Kota Bogor sesuai dengan situasi kekinian. Review ini diperlukan dalam rangka mendukung RPJMN 2015-2019, sehingga pada tahun 2019 Kota Bogor dapat mencapai target 100% akses sanitasi (*Universal Access*) yang mencakup aspek persampahan.

Kegiatan Review Masterplan Persampahan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor dengan tujuan membangun sistem pengelolaan sampah Kota Bogor untuk periode 20 tahun ke depan pada lima aspek :

a. Aspek Teknis dan Operasional, meliputi analisis timbulan dan komposisi sampah; kajian sarana dan prasarana pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, dan pembuangan akhir; pemilahan dan reduksi; pengelolaan skala regional (TPPAS Nambo)

b. Aspek Kelembagaan, meliputi kajian institusi pengelola persampahan baik dari pemerintah terkait pelayanan publik termasuk hierarki manajemen maupun pengelola persampahan di masyarakat.

c. Aspek Regulasi, mengkaji peraturan, panduan, pedoman di tingkat daerah dikaitkan dengan regulasi di tingkat atasnya serta merancang peraturan di daerah yang diperlukan.

d. Aspek Pembiayaan, mengkaji system retribusi kebersihan, anggaran pengelolaan sampah, kebutuhan pembiayaan/investasi dan potensi sumber pembiayaan.

e. Aspek Peran Serta Masyarakat, mengkaji bentuk dan tingkat peran serta masyarakat (formal dan informal) dan potensi partisipasi sektor swasta. Pada intinya adalah mencoba mengikut sertakan dan memberdayakan seluruh stakeholder yang terlibat dalam sistem pengelolaan sampah melalui edukasi yang kontinu, terarah, dan berkelanjutan.

Indikator capaian kinerja Kegiatan Review Masterplan Persampahan ini adalah tersusunnya Laporan Akhir Review Masterplan

Persampahan Kota Bogor 2016 sebanyak 1 dokumen dan hasilnya telah tercapai 100%.

Anggaran Rp. 458.000.000,- yang direalisasikan Rp. 431.299.050,- (94,17%).

8. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran RPJMDyakni meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Adapun program ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja yakni jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK, jumlah kampung iklim, jumlah energy terbarukan serta fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dan perencanaan lingkungan hidup dan perubahan iklim.Adapun target dan capaian indikator kinerja program berikut realisasi kegiatan pendukungnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1
Target dan Capaian Indikator Kinerja
Program Mitigasi dan AdaptasiPerubahan Iklim

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen)	1		*BPLH*
	Jumlah kampung iklim	1		*BPLH*
	Jumlah energy terbarukan	1		*BPLH*
	Fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dan perencanaan lingkungan hidup	40	40	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
	dan perubahan iklim (%)			

Untuk diketahui bahwa dalam kegiatan ini tebagi menjadi dua urusan antara dinas BPLH dan Bappeda. Pencapaian indikator kinerja tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Kegiatan ini bertujuan meningkatnya kepedulian baik pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan yang memperhatikan perubahan iklim atau pembangunan kota rendah emisi dan terfasilitasinya kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim dari berbagai sumber pendanaan ke Kota Bogor. Pada tahun 2016, kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim di Kota Bogor yang terfasilitasi dan terkoordinasi yakni :

1) Penyusunan Energy and Climate Action Plan

Kegiatan ini didanai dan dilaksanakan oleh Agence Francaise de Developpement (AFD) atau bank pembangunan Perancis. Kegiatan bertujuan untuk menyusun dokumen rencana aksi energi dan perubahan iklim Kota Bogor. Dokumen ini menghasilkan :

- Jumlah emisi GRK akan meningkat drastis di tahun 2030 dari 2 juta pada tahun 2010 menjadi 4,4 juta ton setara CO2 (tCO2e) atau 123% jika menggunakan skenario *Business as Usual (BAU)* atau tanpa strategi mitigasi, sedangkan jika melaksanakan strategi mitigasi akan mengurangi peningkatan emisi dari 123% menjadi 47%.
- Strategi mitigasi akan berkontribusi mengurangi emisi GRK dan sekaligus mencegah dampak bencana yang lebih besar dan tak terduga dari perubahan iklim. Target pencapaian dari strategi ini adalah tahun 2030 dengan 10 tindakan prioritas mitigasi pada sektor yang berbeda : energi, transportasi, limbah, industri dan pertanian, kehutanan dan tata guna lahan (AFOLU). Berikut ini adalah beberapa tindakan mitigasi potensial :

- Sektor Energi: Mempromosikan penggunaan peralatan dan perkakas yang lebih efisien di lingkungan perkantoran, perniagaan, permukiman, dan industri.
- Sektor Transportasi : Mengembangkan sistem angkutan umum yang rendah karbon dan berkelanjutan (Bus Trans Pakuan) dan menggiatkan pengendara sepeda, pejalan kaki dan angkutan umum yang efisien.
- Sektor Limbah : Mempromosikan 3 M yaitu Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur Ulang sampah.
- Sektor AFOLU: Penghijauan / Penanaman hutan dan Tata Ruang Kota yang asri.

Tindak lanjut dari rencana aksi ini adalah implementasi melalui berbagai sumber pendanaan, dengan memasukkan ke dokumen perencanaan pembangunan baik Rencana Strategis OPD maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bogor.

2) *Smart Street Lighting Masterplan*

Kegiatan ini didanai dan dilaksanakan oleh Agence Francaise de Developpement (AFD) atau bank pembangunan Perancis. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun model pengelolaan penerangan jalan umum pintar yang mendukung penghematan energi dan pengurangan emisi. OPD Teknis yang melaksanakan kerjasama bantuan ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dokumen ini menghasilkan di antaranya :

- Inventarisasi titik lampu PJU, yakni terdapat 16724 titik yang didominasi jenis lampu SHP/Sodium sebesar 62,9%. Sedangkan jenis lampu LED sebagai jenis lampu rendah emisi dan hemat energi sebesar 6,7%.
- Inventarisasi panel PJU, dengan jumlah 1.284 panel yang pada umumnya berkondisi baik (43%), sedangkan yang berkondisi rusak hanya sebesar 1% atau 4 unit.
- Rumusan skema pendanaan yang melibatkan swasta sebagai pengelola PJU.

Tindak lanjut dari masterplan ini adalah tahap persiapan implementasi, yang dipersiapkan oleh OPD teknis terkait.

3) Pembangunan Kolam Resapan

Kegiatan ini didanai dan dilaksanakan oleh JICA – BBWS Ciliwuwng Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan ini bertujuan melaksanakan proyek percontohan pembangunan *Plastic Rainwater Infiltration Storage Facilities (PRISF)* atau *Pladam Kun* yang berlokasi di lapangan parkir Kantor Bappeda dan Kantor Kecamatan Bogor Utara. Kolam resapan ini dibangun dan diresmikan pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 ini dilaksanakan pemeliharaan, pelatihan pemeliharaan dan serah terima aset. Kolam resapan ini sangat efektif untuk menyerapkan air ke dalam tanah dan mengurangi genangan. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Bina Marga dan Sumbedaya Air untuk monitoring secara teknis. Infrastruktur ini telah dipelihara secara berkala oleh pengelola kantor yang bersangkutan. Diharapkan apabila produk tersebut telah tersedia di Indonesia, dapat dijadikan model yang dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas, mengingat waktu konstruksi yang cukup singkat (sekitar 2 minggu) dan harga satuan pembangunan yang murah jika sudah diproduksi di Indonesia.

4) Eco City Program

Kegiatan ini merupakan kerjasama yang terus berlanjut antara Pemerintah Kota Bogor dan CCROM IPB yang didukung oleh NIES Jepang. Pada kegiatan ini Kota Bogor menjadi obyek penelitian eco city. Cakupan penelitian ini adalah monitoring penggunaan energi listrik melalui pemasangan alat monitoring di 3 Kantor Pemerintah Kota Bogor, 6 rumah tinggal, 2 fasilitas perdagangan dan 2 sekolah, serta penelitian-penelitian terkait skenario eco city di Kota Bogor. Selanjutnya kerjasama masih terus berlanjut dengan fokus *Monitoring Reporting and Verification* emisi gas rumah kaca di Kota Bogor.

Anggaran Rp. 141.900.000,- yang direalisasikan Rp. 125.355.000,- (88,34%).

9. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA & INFORMASI

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran RPJMD yakni tersusunnya kebijakan Membangun sistem basis data antarinstansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan

pendanaan, program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yakni terdiri dari Tingkat ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan. Adapun target dan capaian indikator kinerja program berikut realisasi kegiatan pendukungnya disajikan dalam Tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya *baseline* data yang kuat, akurat dan mutakhir	Tingkat ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan(%)	40%	5 Dok	100%

Kemudian ada beberapa Program Berikut :

a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi lingkup bidang Pemerintahan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan pembangunan tahun 2016 dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dengan mengukur capaian, keluaran, hasil dan dampak kegiatan yang telah direncanakan.

Kegiatan diawali dengan persiapan pembentukan Tim yang ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bogor tahun 2016 tentang Tim monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan, dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing bidang pada Bappeda Kota Bogor.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan rapat-rapat pertemuan dengan para anggota tim baik sebelum pelaksanaan monitoring maupun setelahnya sebagai bahan evaluasi, dan dilaksanakan koordinasi serta konsultasi ke Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk mencari referensi dalam perbaikan monitoring dan evaluasi terutama pada bidang pemerintahan.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan tahun 2016, terdiri dari:

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

- Inspektorat
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kantor Satuan Pol PP
- Kantor Kominfo
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD Kota Bogor
- Kecamatan Bogor Selatan
- Kecamatan Bogor Utara
- Kecamatan Tanah Sareal
- Kecamatan Bogor Timur
- Kecamatan Bogor Barat
- Kecamatan Bogor Tengah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kantor Komunikasi dan Informatika

Monitoring tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, dimulai periode Januari sampai dengan Juni dan periode Juli sampai dengan Desember 2016 dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 41.567.000,-. Kegiatan ini telah mencapai target indikator program yakni Tingkat Ketersediaan dan Validasi Data/Informasi Untuk Perencanaan hingga 40 % yang didukung oleh pencapaian target indikator kinerja kegiatan yang baik, karena hasil monitoring dan evaluasi ini dituangkan kedalam Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2016 yang kemudian buku tersebut disalurkan kepada OPD terkait sebagai bahan referensi bagi OPD dalam usulan kegiatan tahun berikutnya. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, sebagian besar OPD diatas telah mencapai target sasaran kegiatan yang baik sehingga mampu mencapai target indikator program sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target sasaran kegiatan karena kendala administrasi dalam pengadaan barang & jasa, seperti pembangunan kantor kecamatan Bogor Barat dan kecamatan Bogor Timur. Anggaran Rp. 70.950.000,- yang direalisasikan Rp. 41.222.900,- (58,10%).

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Sosial Budaya

Kegiatan ini bertujuan sebagai bahan kebijakan dan perencanaan tahun 2016 (perubahan APBD TA 2016) dan perencanaan tahun 2017. Bahan kebijakan dan perencanaan ini diperoleh melalui pelaksanaan monitoring dan sekaligus evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tersebar di OPD yang berkaitan dengan bidang sosial budaya. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2016. Melalui kegiatan ini, pencapaian kegiatan-kegiatan dalam lingkup sosial dan budaya diuji dengan target yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Perangkat Daerah yang dimonitoring dan evaluasi adalah adalah:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Urusan Sosial)
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Urusan Kebudayaan)
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
6. Kantor Pemuda dan Olah Raga
7. Rumah Sakit Umum Daerah

Monitoring dilakukan secara acak terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Selain itu, informasi dari media massa seperti surat kabar maupun masyarakat secara langsung juga menjadi dasar pemilihan kegiatan yang dimonitor. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis hasil laporan per triwulan seluruh kegiatan dalam lingkup bidang sosial budaya. Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 52.534.808,- ini telah mencapai target indikator Program Pengembangan Data dan Informasi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dengan gambaran umum hasil monitoring sebagai berikut :

a. Umumnya program dan kegiatan lingkup bidang sosial budaya telah dilaksanakan sesuai dengan target dan capaian kerja yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
b. Pada triwulan I, penyerapan anggaran banyak digunakan untuk belanja operasional dan persiapan pelaksanaan kegiatan sehingga belum mencapai target kinerja. Penyerapan anggaran pada triwulan II, III, dan IV telah mengarah pada pencapaian target kinerja.
c. Sarana dan prasarana sekolah dasar (termasuk sarana proses belajar mengajar, toilet, perpustakaan dan bangunan) yang berada dalam koordinasi Dinas Pendidikan masih banyak yang yang membutuhkan penambahan, khususnya pada sekolah dasar di pinggiran Kota Bogor.

d. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar (Rombel) masih banyak yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana maksimal siswa per rombel adalah 32 siswa dan minimal 20 siswa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002. Masih banyak sekolah dasar yang jumlah per rombelnya berkisar 35 s/d 40 siswa, sehingga dikategorikan dalam *rombel gemuk*. Kualitas bangunan hasil revitalisasi sekolah pun masih diperhatikan.
e. Dari urusan kesehatan, sarana dan prasarana Puskesmas, jumlah dokter umum dan perawat masih perlu dilakukan penambahan mengingat rencana pelaksanaan penerapan BLUD Puskesmas di Kota Bogor yang membutuhkan kesiapan SDM di tingkat puskesmas. Seluruh Puskesmas di Kota Bogor diharapkan dapat menjadi puskesmas rawat inap dan secara simultan diperlukan penambahan puskesmas pembantu khususnya di wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan.
f. Tersusunnya laporan realisasi fisik (indikator kinerja) kegiatan yang dibandingkan dengan target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan yang telah disahkan.

Anggaran Rp. 70.950.000 yang direalisasikan Rp. 52.534.808,- (74,04%).

c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi dan Litbang

Dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan di lingkup bidang ekonomi, dan untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan kegiatan di tiap SKPD di lingkup Bidang Ekonomi pada tahun Anggaran 2016, maka di dilaksanakanlah kegiatan monitoring kepada OPD di bawah lingkup bidang ekonomi dan litbang, yang yaitu :

- Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM)
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB)
- Dinas Kebudayaaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- Dinas Pertanian
- Dinas Koperasi dan UKM
- Bagian Perekonomian Setda
- Kantor Ketahanan Pangan

Hasil dari Monitoring tersebut adalah tersedianya laporan pencapaian Kegiatan tahunan masing-masing OPD serta pencapaiannya terhadap target dari indikator kinerja program yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor (RPJMD) 2015-2019. Hasil dari laporan Monitoring ini digunakan sebagai acuan dan rekomendasi dalam mengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

Beberapa catatan yang perlu dijadikan bahan perencanaan hasil dari monitoring ke beberapa SKPD antara lain :

1. Perlu direncanakan percepatan dalam Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dimana belum terpenuhinya salah satu indikator yaitu Jumlah Balai Latihan Kerja, Saat ini BLK yang ada belum mencerminkan BLK yang memenuhi standar.
2. Perlu percepatan dalam proses pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum agar secepatnya menjadi berbadan hukum.
3. Perlu peningkatan peran dari Terminal agribisnis, Sub Terminal Agribisnis agar berfungsi secara optimal. Perlu pembenahan juga terkait Balai Benih Ikan yang ada di Kelurahan Kencana, karena kondisi lingkungan alam yang kurang mendukung akan keberlangsungan Balai Benih Ikan di Kawasan tersebut. Laboratorium kultur jaringan perlu lebih diberdayakan dengan menambah SDM yang kompeten, dan sarana prasarana yang memadai.
4. Perlu dilakukan akselerasi dalam Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dimana dalam RPJMD ada target tingkat destinasi wisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Anggaran Rp. 79.000.000,- yang direalisasikan Rp. 78.326.315,- (99,14%)

d. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

2. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan kegiatan ini merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga pelaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan atau evaluasi menunjukan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang di rencanakan.Tujuan dari kegiatan ini juga untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh OPD pelaksana kegiatan langsung baik yang bersumber anggaran dari APBD II, APBD I dan APBN.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD melalui kegiatan dalam pencapaian program pembangunan sesuai RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 secara periodik.

Indikator kinerja program kegiatan ini adalah tingkat ketersediaan dan validasi data / informasi untuk perencanaan pada tahun 2016 pada RPJMD tercantum target 40% sedangkan indikator hasil tersedianya data / informasi hasil kegiatan ini sudah mencapai 100% pada tahun 2016.

Out put dari kegiatan ini :

1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Semester II Tahun Anggaran 2015 (sebanyak 40 Buku)
2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun Anggaran 2016 (sebanyak 40 Buku)

Anggaran Rp. 236.500.000,- yang direalisasikan Rp. 163.857.910,- (69,28%).

e. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan LingkupBidang Fisik

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Fisik dan Sarana Prasarana Kota secara swakelola guna mengsinkronisasi dan koordinasi terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan pada APBD 2016 pada 5 (lima) SKPD antaralain :

a. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b. Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air
c. Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
e. Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Tujuan kegiatan ini memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan di Tahun pelaksanaan, baik pekerjaan fisik dan perencanaan yang terpadu.

Berdasarkan tabel pencapaian indikator di atas, monitoring dan evaluasi sangat diperlukan guna mendapatkan hasil evaluasi di Tahun berikutnya guna perencanaan pendanaan.

Hasil monitoring terhadap 5 (lima) OPD tersebut antara lain :

1. Perlunya mendorong kegiatan perencanaan pada masing-masing OPD sehingga keberhasilan pelaksanaan program dapat dikendalikan.
2. Distribusi pelaksanaan program harus dipertimbangkan secara cermat dan baik agar prosesnya dapat dilaksanakan secara [proporsional sehingga diperoleh hasil yang tepat sasaran.
3. Pelaksanaan koordinasi antar OPD perlu ditingkatkan intensitasnya.

Anggaran Rp. 132.300.000,- yang direalisasikan Rp. 103.399.500,- (78,16%).

f. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik (SIMPATIK)

Merujuk pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan, data pembangunan dibagi menjadi 2 yakni Data Spasial dan Data Aspasial. Data Spasial terbagi menjadi Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik. Sedangkan Data Aspasial terbagi menjadi Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus. Cara memperoleh Statistik Sektoral dan Statistik khusus, adalah dari data primer yang diolah dari monitoring dan evaluasi ataupun dari data sekunder hasil pendataan Badan Pusat Statistik.

Dasar Hukum SIMPATIK adalah mengacu pada lampiran I Permendagri No 54 / Tahun 2010. Dalam Permendagri tersebut ada 26 urusan wajib daerah,

pengelolaan SIMPATIK disesuaikan berdasarkan pemilihan jenis data pada 24 urusan, 2 urusan yang tidak masuk adalah Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik.

SIMPATIK merupakan kegiatan dengan cara memperoleh Statistik Sektoral dan Statistik Khusus dari hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah melalui suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan data dan informasi. SIMPATIK dilakukan dengan memanfatkan aplikasi basis web yang dapat dibuka secaraelektronikbaikPCmaupunAndroid.

Target dan Realisasi

4. Perkembangan SIMPATIK sejak dimulai pada tahun 2013 dan hingga tahun 2016 mengalami penambahan jumlah data urusan
   dari10 urusan ditambah 14 urusan sehingga menjadi 24 urusan.
5. 6069 data yang tersebar pada 24 urusan wajib maupun urusanpilihan pemerintahan3. 5 eksemplar dokumen tiap tahun guna memenuhi perkembangan terkini urusan pemerintahan basis elektronik.

Hubungan Kegiatan terhadap kebijakan operasional (program) dan kebijakanPembanguan daerah (visi misi tujuan dan sasaran). Kegiatan Pengelolaan SIMPATIk merupakan aksi tahunan dari kebijakan operasional program pengembangan data/informasi/statistik daerah mendukung indikator 40% target tahun 2016 pada bab VIII RPJMD. Program dalam urusan statistik ini sekaligus mendukung sasaran pembangunan daerah Tersedianya baseline data yang kuat, akurat dan mutakhir pada bab VII RPJMD.pada Tujuan 1.3 yakni mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas dalam misi I Menjadikan bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi.

Anggaran Rp. 198.660.000,- yang direalisasikan Rp. 164.913.474,- (83,01%).

g. Pengelolaan Website

Kegiatan Pengelolaan Website Bappeda merupakan bagian upaya penerapan egovernment, yaitu program prioritas Reformasi Birokrasi dan masuk kedalam 8 area perubahan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2010 dan berlanjut pada Nawacita.

Kegiatan Pengelolaan Website Bappeda menampilkan manajemen perubahan dari hal hal dan dokumen yang sifatnya manual kepada hal hal yang sifatnya elektronik yang berisi kumpulan data dan informasi pembangunan pada Bappeda

Kota Bogor, menjadi bagian yang menjawab tantangan go green, paperless dan isu sampah. Selain itu juga mengantisipasi kesinambungan informasi dari generasi ke generasi dan antar generasi.

Data dan informasi yang disediakan dalam pengelolaan website bappeda meliputi berita kegiatan tahunan/bulanan/topdown yang tertuang dalam Rencana Stretegis Bappeda 2010-2014 dan 2015-2019, artikel kegiatan pada bidang-bidang yang ada di Bappeda Kota Bogor serta produk-produk dokumen perencanaan Bappeda.

Sejak tahun 2014 yaitu pada saat tahun pembuatan, bappeda bersama kominfo merancang berbagai fitur guna memudahkan aksesibilitas pengguna maupun management user. Aksesibilitas yakni agar para pemanfaat informasi baik masyarakat maupun instansi nyaman dengan aplikasi tersebut atau user friendly. download file untuk produk-produk tersebut.

Website ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Kota Bogor dalam bentuk tulisan, gambar, suara, dan video. Website ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki komputer dan akses internet, tanpa terikat oleh tempat dan waktu

Target dan Realisasi

100% mendukung memberikan informasi dalam bentuk 24 berita, 6 artikel dan 4 dokumen perencanaan

Hubungan Kegiatan terhadap kebijakan operasional (program) dan kebijakan pembanguan daerah (visi misi tujuan dan sasaran)

Kegiatan Pengelolaan Website merupakan aksi tahunan dari program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa mendukung indikator 40% target tahun 2016 pada bab VIII RPJMD atau indikator OPD yang menyediakan informasi publik sesuai undang undang tentang keterbukaan informasi publik. Program dalam urusan komunikasi dan informatika ini sekaligus mendukung sasaran pembangunan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada bab VII RPJMD.

pada Tujuan 1.1 yakni meningkatkan implementasi egovernment dalam misi I Menjadikan bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi

Sekaligus mendukung Sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dengan indikator OPD

yang menyediakan informasi publik sesuai KIP pada Tujuan 5.1 mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pada Misi 5 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Intinya indikator kegiatan harus terlaporkan target dan realisasinya, dan sejauhmana realisasi kegiatan tersebut mendukung target kinerja program dan target kinerja sasaran RPJMD. Kalau ada kegiatan yang mendukung program prioritas atau capaian misi.

Anggaran Rp. 124.162.500,- yang direalisasikan Rp. 120.534.000,- (97,08%).

h. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan proses perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang di kelola secara transparan.

Tujuan dari kegiatan ini untuk membuat sistem informasi guna menunjang implementasi system pemerintahan yang baik (good Govermance). Sistem yang dibangun adalah sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan penganggaran dan monitoring evaluasi hasil perencanaan pembangunan berbasis web atau SIMR@L atau e-Planing.

Sasaran SIMR@L atau e-Planing ini adalah seluruh OPD Kota Bogor dalam proses perencanaan kegiatan. SIMR@L atau e-Planing dikembangkan untuk membantu proses pendataan pada setiap tahapan perencanaan serta pengelolaannya yang semula dikerjakan secara manual beralih ke suatu proses yang menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan suatu output dan sistem pendataan yang lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan ini mensosialisasikan dan memberikan pelatihan tentang pengoperasian Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planing) kepada para operator di masing-masing OPD serta pemeliharaan sistem serta pemuktahiran aplikasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung misi 1 yaitu menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi yang bermaktub dalam RPJMD Kota Bogor. Target indikator program kegiatan ini adalah tingkat ketersediaan dan validasi data/informasi untuk

perencanaan (%), pada tahun 2016 adalah 40% dan pencapaian tahun 2016 adalah 40% jadi pencapaian terhadap target sudah 100%.

Output pelaksanaan ini adalah :

a. Terselenggaranya pelatihan bagi operator SIMR@l e-Planing sebanyak 100 orang
b. Tersediannya dokumen hasil pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan sebanyak 5 buku.
c. Terpeliharanya 1 paket system perencanaan pembangunan daerah
d. Pemutahiran sistem perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 paket aplikasi dengan melakukan penambahan modul dalam system.

Anggaran Rp. 368.000.000,- yang direalisasikan 337.424.559,- (92,19%).

10. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah berupa tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah dan telah dicapai dengan baik melalui pelaksanaan musrenbang, penyusunan rencana pembangunan tahunan, penyusunan kebijakan umum pemerintah, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan. Program ini dilaksanakan melaluikegiatan yaitu:

a. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016

Kegiatan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana setiap pemerintah daerah dalam melakukan proses perencanaan pembangunan di wilayahnya mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dengan harapan bahwa pembangunan yang telah direncanakan tepat sasaran sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek.

Kegiatan ini diawali dengan Pembentukan Tim, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bogor Tahun 2016 tentang Tim Musrenbang Kota Bogor Tahun 2016 dengan melibatkan OPD terkait, dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Tingkat kelurahan yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2016 di 68 Kelurahan sekaligus menjadi narasumber dengan memberikan arahan dan masukan kepada peserta bahwa usulan tersebut diharapkan mengacu kepada dokumen-dokumen yang ada di kelurahan kemudian dimusyawarahkan untuk dibawa ke tingkat kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan;
b. Rapat persiapan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan agenda memperiapkan bahan paparan Rancangan Awal RKPD tahun 2017 sebagai bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan pada Bulan Februari 2016 di 6 Kecamatan se Kota Bogor;
c. Persiapan Forum OPD dengan agenda mempersiapkan bahan paparan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan yang akan disinkronkan dengan kegiatan yang ada dimasing-masing OPD, sehingga usulan Musrenbang yang menjadi Prioritas pada tingkat Kecamatan bisa terakomodir pada kegiatan OPD;
d. Persiapan Musrenbang Tingkat Kota Bogor, dengan agenda mempersiapkan bahan paparan hasil Forum OPD, undangan peserta Musrenbang, permohonan Narasumber baik dari Kota Bogor maupun dari Propinsi Jawa Barat, serta persiapan pelaksanaan Pameran pembangunan tahun 2016, sehingga diharapkan usulan Musrenbang yang telah diakomodir oleh OPD disampaikan kepada seluruh perwakilan yang hadir pada acara Musrenbang Tingkat Kota Bogor;
e. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Bogor tahun 2016 dilaksanakan bulan Maret 2016 di Ruang Rapat I Balaikota Bogor dengan fasilitas yang diberikan kepada peserta berupa makan, snack, ATK, Tas Musrenbang dan uang saku untuk sekitar 300 orang peserta musrenbang dirangkaikan dengan kegiatan Pameran Pembangunan terdiri dari 18 stand dengan peserta dari OPD dan instansi vertikal seperti Polres Bogor Kota, Kantor Pajak Pratama Cabang Bogor, Bank Pasar, Bank Jabar Banten dan lain – lain selama 5 hari bertempat di Plaza Balaikota Bogor dengan menampilkan pentas seni dari berbagai sanggar kesenian binaan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor;
f. Mengikuti Pra Musrenbang Tingkat Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kota Bogor dengan peserta Bappeda Kab/Kota se-wilayah 1 Bogor, dengan agenda penyampaian usulan-usulan kegiatan yang diajukan ke Propinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan mengikuti Musrenbang Tingkat

Propinsi Jawa Barat di Bandung dengan agenda Desk/asistensi usulan-usulan yang terakomodir dalam Musrenbang Tingkat Propinsi Jawa Barat.

Hasil dari pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat Kelurahan, kecamatan hingga tingkat Kota Bogor tahun 2016 adalah adanya dokumen Usulan Rencana (UR) yang telah disinkronkan dengan seluruh usulan kegiatan OPD sebagai bahan penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2017. Kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp. 441.631.103,- ini telah mencapai beberapa target indikator kinerja kegiatan sehingga pencapaian indikator program Tingkat Pelaksanaan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah telah mencapai 40% sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Anggaran Rp. 443.390.000 yang direalisasikan Rp. 439.231.103,- (99,06%).

b. Kegiatan Sinergitas Perencanaan Kab/Kota (Banprov)

Penyelenggaraan dana sinergitas perencanaan pembangunan propinsi Jawa Barat kepada Bupati/Walikota sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dana sinergitas Bappeda Propinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi perencanaan Propinsi Jawa Barat dengan Kabupaten/Kota, Adapun tujuannya adalah memperkuat koordinasi perencanaan Propinsi Jawa Barat dan Kab/Kota dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah berbasis data dan evaluasi, Sedangkan sasarannya adalah peningkatan prioritas guna mewujudkan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah melalui data dan evaluasi berbasis kecamatan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan dokumen evaluasi perencanaan pembangunan berbasis kecamatan tahun 2013-2015 dengan melibatkan unsur terkait seperti BPS, Kecamatan, dan dinas terkait sebanyak 50 buku yang telah didistribuskan kepada kecamatan, kelurahan dan OPD terkait
- Dilaksanakan workshop evaluasi perencanaan pembangunan berbasis kecamatan bertempat di CICO Cimahpar dengan peserta dari unsur kecamatan dan kelurahan, OPD terkait dan BPS dengan jumlah peserta 46 orang

Adapun dokumen tersebut berisikan tentang pencapaian perencanaan pembangunan Kota Bogor tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 per kecamatan dengan cakupan antara lain tentang Indek Pembangunan Manusia, dengan komponenya yaitu rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka harapan hidup, dan daya beli masyarakat, Laju pertumbuhan ekonomi, Persentase

penduduk miskin serta tingkat pengangguran, dan dukungan anggaran baik bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota sebagai bahan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pembangunan di Kota Bogor.denganrealisasi anggaran sebesar Rp. 98.472.300,00 target kinerja 100% tercapai.

Anggaran Rp. 100.000.000,- yang direalisasikan Rp. 98.472.300,- (98,47%).

c. Monitoring dan Evaluasi MDG's dan IPM

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan program pemerintah pusat yang mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. MDGs bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan untuk semua orang, kesetaraan gender, mengurangi kematian balita, memerangi penyakit menular, dan menjamin kelestarian lingkungan hidup sampai dengan tahun 2015.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bahan evaluasi pencapaian RAD MDGs pada tahun 2015 melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi yang dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluai MDG's. Target Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dicapai dengan baik oleh kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 93.887.883,- Melalui kegiatan ini, dihasilkan beberapa poin penting yakni:

a. Deskripsikan pencapaian tujuh tujuan MDGs di Kota Bogor hingga Tahun 2015.
b. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai target RAD MDGs Kota Bogor
c. Merancang strategi dan kebijakan dalam bentuk program/ kegiatan yang harus ditempuh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)* 2016- 2031.

Berikut disampaikan beberapa ringkasan pencapaian target MDG'S di Kota Bogor tahun 2015:

1. Persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan turun pada tahun 2011 dari 9,16% menjadi 8,19% pada tahun 2014, sedangkan target MDGs Kota Bogor tahun 2015 adalah 8,30%.
2. Pencapain Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2013 telah mencapai 98,1% dari target tahun 2015 sebesar 96,81%.

Indeks pembangunan manusia di Kota Bogor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel

IPM Kota Bogor perhitungan dengan metode baru

Tahun 2010-2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IPM:	71,25	71,72	72,25	72,86	73,10	73,65
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	72,54	72,55	72,56	72,57	72,58	72,88
Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,72	11,85	11,98	12,10	12,23	12,36
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,35	9,43	9,60	9,96	10,01	10,20
Pengeluaran	10.147.930	10.266.360	10.438.490	10.488.490	10.532.340	10.576.370

Sumber : BPS Kota Bogor

Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kota Bogor semakin membaik. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2015. Kota Bogor telah berhasil mencapai level pembangunan manusia "tinggi". Peningkatan kapabilitas dasar manusia merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatkan kualitas manusia.

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e0). Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2010 hingga 2015, angka harapan hidup Kota Bogor terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Saat ini, angka harapan hidup saat lahir di Kota Bogor telah mencapai

72,88 tahun. Selama lima tahun, angka harapan hidup saat lahir di Kota Bogor tumbuh 0,07 persen per tahun.

Pendidikan meningkatkan pengetahuan dan kreativitas manusia. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang kehidupan mereka. Sampai dengan tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun keatas di Kota Bogor telah mencapai 10,20 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,36 tahun atau mencapai Diploma I. Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat. Rata-rata lama sekolah tumbuh 0,17 persen pertahun, sementara harapan lama sekolah tumbuh 0,13 persen per tahun.

Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan. Uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti. Tahun 2015, pengeluaran per kapita penduduk Kota Bogor telah mencapai 10,58 juta per tahun. Pengeluaran per kapita Kota Bogor terus meningkat selama empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,23 persen per tahun. Selama kurun waktu tersebut, perkembangan pengeluaran pada tahun 2012 hingga 2015 cenderung melambat dibanding perkembangan pada tahun 2010 hingga 2012 walaupun ditahun 2015 kembali mengalami peningkatan. Hal ini bisa dipahami bahwa dua tahun terakhir krisis global semakin berdampak pada perekonomian di Indonesia.

Anggaran Rp. 100.550.000,- yang direalisasikan Rp. 93.457.883,- (92,95%)

d. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017, serta diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 menunjang Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan indikator kinerja programnya yaitu tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah (%) dengan target 40%.

Adapun proses penyusunan ini mengacu kepada dokumen RKPD, rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sedangkan rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Rancangan KUA dan PPAS ini kemudian disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas,pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dan dituangkan ke dalam nota

kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Dalam hal kepala daerah berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Dokumen tersebut selanjutnya menjadi pedoman setiap unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Tahun 2017 dan acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017, serta tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang aplikatif dan aspiratif.

Hasil dari kegiatan ini berupa:

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bogor Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

NOMOR	:	903 / 16- BAPPEDA / 2016 903 / 916 - DPRD
TANGGAL	:	09 November 2016

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bogor Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran SementaraTahun Anggaran 2017

NOMOR	:	900 / 17- BAPPEDA / 2016 900 / 917 - DPRD
TANGGAL	:	09 November 2016

Anggaran Rp. 397.370.000,- yang direalisasikan Rp. 361.637.514,- (91,03%).

e. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) berdasarkan RKPD Perubahan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pembahasan KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan pembahasan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016. Hasilnya berupa sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman unit kerja dalam menyusun RKA Perubahan pada OPD dan acuan penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2016, serta menciptakan perencanaan pembangunan yang aplikatif dan aspiratif. Dokumen tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bogor Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 .

NOMOR	:	900 / KK.12- BAPPEDA / 2016 903 / 644 - DPRD
TANGGAL	:	07 September 2016

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bogor Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017

NOMOR	:	900 / KK.13- BAPPEDA / 2016 903 / 645 - DPRD
TANGGAL	:	07 September 2016

Anggaran Rp. 342.688.500,- yang direalisasikan Rp. 217.179.230,- (63,38%).

f. Pengkajian RKA OPD T.A 2017

Kegiatan pengkajian RKA 2017 merupakan tindak lanjut dari dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bogor Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Kegiatan pengkajian RKA 2017 menunjang Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan indikator kinerja programnya

yaitu tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah (%) dengan target 40%.

Kegiatan ini ditujukan agar seluruh kegiatan pembangunan dapat berjalan secara terarah sesuai dengan sasaran, tujuan dan target kinerja berdasarkan KUA, dan PPAS 2017.

Tahapan kegiatan pengkajian RKA 2017 sebagai berikut:

- ✓ Pembahasan dokumen Pra RKA-OPD 2017 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- ✓ Pelaksanaan asistensi Pengkajian Terhadap Usulan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2017;
- ✓ Mengkaji dan membahas kesesuaian program dan kegiatan dalam RKA-OPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta melaksanakan Rekapitulasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebagai bahan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Asistensi RKA-OPD 2017 sesuai Surat Perintah Walikota Bogor.

Output dari kegiatan ini adalah:

1. Dokumen Pra RKA seluruh OPD tahun anggaran 2017;
2. Dokumen hasil asistensi RKA seluruh OPD tahun anggaran 2017;
3. Bahan penyusunan RAPBD 2017.

Anggaran Rp. 327.789.000,- yang direalisasikan Rp. 324.744.000,- (63,38%).

g. Pengkajian RKA OPD Perubahan T.A 2016

Kegiatan pengkajian RKA Perubahan 2016 merupakan tindak lanjut dari dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bogor Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan pengkajian RKA Perubahan 2016 menunjang Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan indikator

kinerja programnya yaitu tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah (%) dengan target 40%.

Tujuan Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyesuaikan APBD murni 2016 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang dibahas bersama antara DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Pengkajian dilakukan apabila selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran.

Penyusunan Dokumen Perencanaan RAPBD Perubahan Tahun 2016 dilakukan melalui proses asistensi RKA OPD Perubahan Tahun 2016. Tujuannya agar kegiatan pembangunan dapat berjalan secara terarah sesuai dengan sasaran, tujuan dan target serta sesuai dengan RKPD Perubahan, KUPA dan PPAP. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Asistensi RKA-OPD 2017 sesuai Surat Perintah Walikota Bogor.

Output dari kegiatan ini adalah:

1. Dokumen hasil asistensi RKA Perubahan seluruh OPD tahun anggaran 2016;
2. Bahan penyusunan RAPBDP 2016.

Anggaran Rp. 198.660.000,- yang direalisasikan Rp. 164.278.492,-

h. Penyusunan RKPD dan Penelitian Renja OPD

- Penyusunan RKPD

RKPD Kota Bogor merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pembentukan Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Tim Penyusun RKPD tahun 2017 dengan melibatkan unsur OPD seperti BPS, BPKAD, Dispenda, Bagian Pengendalian Program, dan unsur Inspektorat, serta para Kepala Bidang/Kasubid/kasubag serta

Pelaksana pada Bappeda merupakan tahapan paling awal dari kegiatan ini, dengan agenda lainnya sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan rancangan awal RKPD, yang dilanjutkan dengan Perumusan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017, merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam rangka menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 tahun;
b. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017 dibuat menurut sistematika rancangan awal, sebagai dasar perubahan materi terkait isi rancangan akhir RKPD;
c. Penetapan RKPD Tahun 2017 pada bulan Mei Tahun 2016 melalui Keputusan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017. Namun, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah, maka RKPD Tahun 2017 Kota Bogor mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan RKPD Tahun 2017;
d. Sosialisasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 kepada sekitar 200 orang peserta dengan tujuan untuk menyampaikan rencana kebijakan yang tertuang dalam Buku RKPD tahun 2017 kepada seluruh OPD;
e. Pengesahan Rencana Kerja OPD Tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan RKPD tahun 2017, dengan terbitnya Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-177.1 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2017;
f. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Perubahan 2016, yang dilanjutkan dengan Perumusan Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2016, merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam rangka menyusun rancangan Renja OPD perubahan 2016;

g. Penetapan RKPD Perubahan Tahun 2016 pada bulan Agustus 2016, dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016;
h. Penyampaian usulan kegiatan dari masing-masing OPD ke Bappeda Propinsi Jawa Barat melalui RKPD Online baik perubahan 2016 maupun rencana kegiatan tahun 2017.

Dengan telah disusunnya dokumen RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016 serta telah disahkannya Rencana Kerja seluruh OPD melalui Keputusan Walikota, maka target Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target tahun 2016 sebesar 40 % telah tercapai dengan baik dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 367.532.744,-.

- Penelitian Renja OPD

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 yang meliputi:

a) Penelitian Renja SKPD Bidang Fisik dan Prasarana
b) Penelitian Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Litbang
c) Penelitian Renja SKPD Bidang Pemerintahan
d) Penelitian Renja SKPD Bidang Sosial Budaya
e) Sosialisasai Renja SKPD Tahun 2016

Hasil kajian tersebut kemudian disyahkan oleh Walikota, sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan tahun 2016.
Anggaran Rp. 378.400.000,- yang direalisasikan Rp. 362.943.744,- (95,92%).

i. Penyusunan Pedoman Renja OPD

Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 . Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk

menyamakan persepsi tentang mekanisme penyusunan Rencana Kerja OPD di Kota Bogor yang menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Bogor.

Dari kegiatan ini telah tersusun Rancangan Tatacara Penyusunan Renja OPD Tahun 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Pedoman Penyusunan Renja OPD Tahun 2018 yang selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh OPD se Kota Bogor, sebagai bahan acuan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2018. Anggaran Rp. 100.000.000,- yang direalisasikan Rp. 89.195.000,- (89,20%).

j. Perencanaan Umum

Kegiatan perencanaan umum meliputi beberapa penyelenggaraan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat. Kegiatan ini merupakan forum untuk mendiskusikan dan mencari solusi pemecahan atas berbagai permasalahan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah, serta sebagai salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi serta memenuhi undangan dari pihak Propinsi Jawa Barat dan Propinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang perencanaan selama 12 bulan.
b. Memfasilitasi kegiatan Percepatan Prioritas Pembangunan berupa rapat-rapat dan peninjauan lapangan dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan di Kota Bogor selama 12 bulan.
c. Memfasilitasi penyusunan tugas khusus yang tidak terakomodir dalam kegiatan sebanyak 4 kali

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan sinergitas perencanaan pembangunan antara kabupaten/kota dengan Provinsi Jawa Barat, serta terfasilitasinya kegiatan percepatan prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2016 sebagai upaya untuk menampung ide-ide dari para ahli dalam rangka percepatan prioritas pembangunan di Kota Bogor. Anggaran sebesar Rp. 1.111.900,- dengan realisasi Rp. 998.736.955,- (89,82%).

11. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANSOSIAL BUDAYA

a. Pembinaan Forum Kota Sehat

Pembinaan Forum Kota Sehat merupakan salah satu kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Tahun Anggaran 2016, Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terwujudnya kota Bogor sebagai kota sehat. Dasar hukum dan pedoman pelaksanaan kegiatan yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005 No. 1138/menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota.

Mewujudkan kota Bogor sebagai kota sehat memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar serta berkelanjutan. Proses mewujudkan kota sehat melibatkan komitmen Pemerintah, penguatan kelembagaan dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat kota Bogor. Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat (yang terdiri dari OPD Kota Bogor) dan Forum Kota Sehat (unsur-unsur perwakilan masyarakat Kota Bogor) dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 050.45-287 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat dan Forum Kota Sehat Kota Bogor yang bertujuan mengsinergikan arah pencapaian kota Bogor sebagai kota sehat.

Penyelenggaraan Kota Sehat terdiri dari 9 (sembilan) tatanan dan tiga jenis penghargaan, adapun tatanan tersebut sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum
2. Kawasan sarana lalu lintas, tertib dan pelayanan transportasi
3. Kawasan pertambangan sehat
4. Kawasan hutan sehat
5. Kawasan industri dan perkantoran sehat
6. Kawasan pariwisata sehat
7. Ketahanan pangan dan gizi
8. Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri
9. Kehidupan sosial yang sehat

Setiap dua tahun sekali (pada tahun ganjil) Kabupaten/Kota sehat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan akan diberikan penghargaan Swasti Saba. Penghargaan tersebut diklarifikasikan 3 (tiga) katagori yaitu:

1. PADAPA (pemantapan) minimal 2 tatanan
2. WIWERDA (pembinaa) 3 - 4 tatanan
3. WISTARA (pengembangan) > 5 tatanan

Tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum dan tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri merupakan tatanan wajib pada setiap

Penyelenggaraan Kota Sehat. Kota Bogor pada dua tatanan tersebut telah mendapatkan penghargaan PADAPA (pemantapan) pada tahun 2016.

Penyelenggaraan Kota Sehat merupakan kegiatan yang berkelanjutan, tatanan yang telah mendapatkan penghargaan harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Untuk menunjang penyelenggaraan kota sehat yang berkelanjutan Bappeda Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2016 mengadakan Kegiatan Pembinaan Forum Kota Sehat sebagai bentuk upaya mempertahankan dan memperkuat kelembagaan kota sehat yang melibatkan OPD terkait penyelenggaraan kota sehat dan unsur-unsur lembaga pemberdayaan masyarakat kota Bogor. Adapun pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Forum Kota Sehat yaitu:

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pembinaan forum Kelurahan	1 kali (68 Kecamatan)
2.	Pembinaan forum Kecamatan	1 kali (enam Kecamatan)
3.	Pembinaan tingkat kota	1 kali
4.	Buku laporan pembinaan forum kota sehat	1 Buku
5.	Monitoring pembinaan kota sehat	12 Bulan

Pembinaan forum Kecamatan, forum Kelurahan dan tingkat kota merupakan kegiatan dalam rangka memperkuat kelembagaan baik antar OPD maupun dengan lembaga kemasyarakatan.

1. Pembinaan Forum Kelurahan

   Merupakan dasar penguatan kelembagaan, pembinaan forum kelurahan bertujuan mendapatkan masukan dan saran mengenai progres penyelenggaraan kota sehat dan mendapatkan usulan dari wilayah mengenai lokasi fokus baru untuk pengembangan tatanan kota sehat. Pembinaan forum Kelurahan selain melibatkan Tim Pembina dan FKS juga melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan

2. Pembinaan Forum Kecamatan

   Lanjutan dari pembinaan tingkat Kelurahan, pada pembinaan ini fokus pada upaya peningkatan dari 2 tatanan menjadi 4 tatanan kota sehat sehingga kota Bogor pada tahun 2017 diharpakan memperoleh penghargaan WIWERDA (pembinaan). Pembinaan forum Kelurahan selain melibatkan Tim Pembina dan FKS juga melibatkan LPM Kecamatan dan Kelurahan

3. Pembinaan Tingkat Kota

Pembinaan yang melibatkan baik Tim Pembina Kota Sehat, FKS dan seluruh LPM di kota Bogor, pembinaan ini berfokus pada kesepakatan 2 tatanan baru yang akan diusulkan penilaian dan verifikasi kepada Provinsi dan Pusat pada tahun 2017 yaitu tatanan kawasan pariwisata sehat dan tatanan kehidupan sosial yang sehat.

4. Laporan Pembinaan Forum Kota Sehat

Forum Kota Sehat (FKS) merupakan pendamping pemerintah kota Bogor dalam memonitor dan mengevaluasi serta memberikan masukan kepada Tim Pembina Kota Sehat mengenai arah dan kondisi perkembangan penyelenggaraan kota sehat di kota Bogor. Sebagaimana telah disepakati bahwa tahun 2017 kota Bogor akan mengusulkan 4 (empat) tatanan untuk dinilai dan di verifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat, yaitu:

1. Kehidupan masyarakat sehat mandiri (tatanan wajib)
2. Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum (tatanan wajib)
3. Kawasan pariwisata sehat (tatanan yang diusulkan)
4. Kehidupan sosial yang sehat (tatanan yang diusulkan)

   Dua tatanan wajib yang telah mendapat penghargaan harus dipertahankan dan dikembangkan dan dua tatanan yang diusulkan perlu dilakukan pembinaan dan penguatan kelembagaanya. Tim Pembina Kota Sehat dan FKS Kota Bogor aktif dalam melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan melalui forum disertai monitoring dan evaluasi progres penyelenggaraan kota sehat kota Bogor. Pelaksanaan penguatan kelembagaan, monitoring dan evaluasi ini di biayai oleh APBD Kota melalui kegiatan Penguatan Kota Sehat yang dituangkan dalam bentuk buku laporan Pembinaan Kota Sehat dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 148.731.679,-.

Anggaran Rp. 189.200.000,- yang direalisasikan Rp. 145.636.679,- (76,97%).

b. Fasilitasi TKPKD Kota Bogor

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bahan evaluasi kinerja percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dasar hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemiskinan Kota Bogor adalah Keputusan Walikota Bogor Nomor 400.45-179.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kemiskinan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan identifikasi penerima manfaat program kemiskinan yang dilaksanakan di Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Timur.

b. Pembuatan Sistem Informasi Manajamen (SIM) penerima manfaat program kemiskinan berbasis data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2011.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan tahun 2015 di wilayah kelurahan dan kecamatan selama 2 kali.

Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 352.547.327,- dengan pencapaian target indikator kinerja program hingga 40% sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD dengan hasil kegiatan ini sebagai berikut :

a. Tersusunnya dokumen identifikasi penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Timur yang telah diberikan atau diintervensi oleh OPD terkait kepada Rumah Tangga Miskin. Sasaran khususnya kategori 1 yang berada dalam data TNP2K, sebagai bahan rekomendasi penanganan dalam bentuk program dan kegiatan yang terintegrasi dari sisi keterlibatan program dari berbagai tingkatan dan sumber pembiayaan.

b. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai metode pelaksanaan dalam kegiatan penyusunan informasi manajemen khususnya penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan pada kategori 1 data TNP2K.

c. Terevaluasinya perkembangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kategori 1 hasil intervensi OPD tahun 2015, berdasarkan laporan dari masing-masing kelurahan sebanyak 7.135 RTS atau sekitar 35.675 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

- Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 1.360 RTS atau 6.800 jiwa
- Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 247 RTS atau 1.235 jiwa
- Kecamatan Bogor Barat sebanyak 152 RTS atau 760 jiwa
- Kecamatan Bogor Utara sebanyak 1.469 RTS atau 7.345 jiwa
- Kecamatan Bogor Timur sebanyak 11 RTS atau 55 jiwa
- Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 3.896 RTS atau 19.480 jiwa

Anggaran Rp. 375.700.000,- yang direalisasikan Rp. 351.564.877,- (93,58%).

c. Fasilitasi dan Penguat Komda Lansia

Kegiatan ini merupakan bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia di Kota Bogor dan untuk mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visinya yaitu "Terwujudnya Lansia Jawa Barat Yang Mandiri, Produktif dan Menjadi Tauladan Generasi Mendatang". Keluaran dari kegiatan ini yaitu terdatanya penduduk lansia kota Bogor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia kota Bogor, adapun pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

No.	Kegiatan	Hasil/Pelaksanaan
1.	Kajian permasalahan dan potensi lansia kota Bogor	1 Dokumen
2.	Fasilitasi pelaksanaan hari ulang tahun lanjut usia	1 kali
3.	Pembinaan Lansia	6 Kecamatan

1) Fasilitasi Pelaksanaan hari ulang tahun lanjut usia

Merupakan bentuk dukungan dengan berpatisipasi pelaksanaan Lomba Lansia Sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lansia Kota Bogor.

2) Pembinaan Lansia

Pembinaan ini bertujuan memberikan motivasi masyarakat lanjut usia yang mandiri, sehat dan berdayaguna bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah, pembinaan dilaksanakan di 6 Kecamatan Kota Bogor dengan melibatkan OPD terkait, Paguyuban Pensiunan Pegawai Pemerintah Daerah Kota Bogor

dan perwakilan masyarakat yang sebagai koordinator Lansia di setiap Kecamatan Kota Bogor sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tentang Komisi Lanjut Usia Kota Bogor dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 60 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.

Selain pembinaan, juga melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan terkait pelayanan pos binaan terpadu (Posbindu) lansia, pelaksanaan ini didampingi Ketua Paguyuban Pensiunan Pegawai Pemerintah Daerah dan koordinator wilayah 6 masing Kecamatan Kota Bogor serta OPD yang tercantum dalam SK. Walikota tersebut di atas. Tahun 2015 kota Bogor memiliki 391 posbindu dengan jumlah kader sekitar 1.862 kader yang tersebar di 68 Kelurahan Kota Bogor.

3) Kajian permasalahan dan potensi lansia kota Bogor

Untuk mengetahui tingkat kemandirian lansia, maka perlu dibuat kajian mengenai permasalahan dan potensi lansia di Kota Bogor. Dari hasil kajian didapat tiga tingkatan posbindu sebagai berikut:

No.	Tingkatan	Jumlah Posbindu
1.	Pratama	123
2.	Madya	171
3.	Purnama	56
4.	Mandiri	25

Dari tabel di atas terlihat banyaknya Posbindu tingkat Pratama yang merupakan Posbindu dengan tingkat keaktifan paling rendah baik pelayanan maupun kader lansia. Permasalah dari banyaknya Posbindu tingkat Pratama yaitu masih kurangnya tingkat kesadaran penduduk lansia untuk berkunjung ke Posbindu serta minimnya fasilitas sarana penunjang opersional Posbindu yang masih mengandalkan anggaran dari pemerintah.

Anggaran Rp. 189.200.000,- yang direalisasikan Rp. 162.165.525,- (85,71%).

12. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI DAERAH

a. Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Data pokok perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan bersifat top down atau perintah undang undang yang dilaksanakan sejak tahun 2014 oleh

pemerintah kota bogor yakni diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. (Pasal 9 Permendagri No. 8 tahun 2014).

Dasar hukum SIPD adalah Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah (Pasal 274 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

SIPD bertujuan mewujudkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah (pasal 258 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Manfaat SIPD adalah :

1. Membangun rumah legal database 32 Urusan Konkuren dan Penunjang untukseluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan daerah yang harus ditetapkan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah.
4. SIPD sebagai tools/alat untuk pengadministrasian rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Daerah.
5. SIPD Sebagai tools/alat untuk membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara hirarki agar menjamin sasaran dan target tepat sasaran.

Target dan Realisasi

Target dan realisasi SIPD adalah

1. 100% pelaksanaan dokumentasi, administrasi, serta pengolahan data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah serta lancarnya perhitungan DAU dan DAK dari pemerintah pusat dan atau bantuan keuangan propinsi jawa barat.
2. 3159 data SIPD yang tersebar dalam 32 urusan atau 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan
3. 20 eksemplar dokumen SIPD setiap tahunnya beberapa diantaranya untuk mendukung evaluasi pada tingkat pemerintah pusat dalam HARI OTONOMI DAERAH, pemenuhan permohonan dokumen oleh perwakilan BPKP, dan BPKRI.

Selain target dan realisasi SIPD, kegiatan data pokok perencanaan pembangunan daerah juga merangkum dokumen Kota Bogor Dalam Angka. Setiap tahunnya, akan terjadi gap periodisasi antara tahun pelaporan berhadapan dengan konten tahun yang dilaporkan. Misal tahun pelaporan 2016 akan memberikan hasil penyusunan Kota Bogor Dalam Angka 2015.

Merujuk pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan, data pembangunan dibagi menjadi 2 yakni Data Spasial dan Data Aspasial. Data Spasial terbagi menjadi Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik. Sedangkan Data Aspasial terbagi menjadi Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus. Cara memperoleh Statistik Sektoral dan Statistik khusus, adalah dari data primer yang diolah dari monitoring dan evaluasi ataupun dari data sekunder hasil pendataan Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu upaya memenuhi data sekunder dilakukan bekerjasama dengan BPS dan kota bogor membutuhkan data tersebut dalam hal prakiraan maju perencanaan pembangunan daerah

Target dan realisasi Kota Bogor Dalam Angka adalah

1. 100% memenuhi kebutuhan stakeholder baik dalam Penyusunan dokumen perencanaan daerah, studi penelitian mahasiswa, kebutuhan legislatif daerah, penyusunan anggaran di BPKAD hingga BPKRI.
2. 100 eksemplar penyusunan dokumen Kota Bogor Dalam Angka

Anggaran Rp. 140.961.000,- yang direalisasikan Rp. 136.324.500,- (96,71%).

b. Indikator Makro Ekonomi (IME)

Kegiatan Ini bertujuan menyediakan informasi tentang kondisi ekonomi makro kota bogor yang dapat di manfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingkan dengan cara menggandakan dokumen hasil publikasi badan pusat tastatistik (BPS) berupa PDRB Kota Bogor dan inflasi kota bogor. Tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena BPS tidak bisa melaksanakan kerjasama dengan pemerintah kota bogor untuk produk ini karena kegiatan tersebut merupakan tupoksi BPS dan pelasanaannya ada yang sudah di biayai APBN jadi dikhawatirkan terjadi tumpang tindih pada pembiayaannya, dalam hal penyusunan tersebut hanya menggunakan APBD kota bogor Rp 10.370.000 dari anggaran yang tersedia Rp. 359.480.000 sisa anggarannya dikembalikan ke Kas Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Dalam rangka peningkatan dan penyamaan persepsi dalam tingkat kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam menyikapi permasalahan yang kritis dan krusial yang terkait dengan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Saat ini sedang berupaya meningkatkan pelayanan, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi perencanaan daerah
2. Peningkatan perencanaan yang partisipatif
3. Peningkatan informasi perencanaan dan pembangunan daerah
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah

Isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang paling utama adalah :

1) Perencanaan yang didorong oleh semangat untuk meningkatkan Ekonomi dan Polkam maupun Pelayanan Publik
2) Perencanaan yang sesuai dengan perubahan paradigma pemerintahan dari mengayuh (rowing) menjadi mengendalikan (steering)
3) Perencanaan yang berorientasi kepada hasil daripada input
4) Perencanaan yang berorientasi pada pemberdayaan seluruh komponen daerah *(stokeholder)*
5) Perencanaan yang mendorong terwujudnya *good local governance*
6) Perencanaan yang lebih menitikberatkan pada proses *bottom up* daripada *top down* seirama dengan semangat desentralisasi pemerintahan

7) Perencanaan yang lebih memadukan lintas sektoral, lintas perwilayahan dan keterpaduan sektor dan wilayah
8) Perencanaan yang mencerminkan keterbukaan dan transparan
9) Perencanaan yang dapat mendorong meningkatnya daya saing daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1) Tingkatkan keahlian sumberdaya manusia dengan pemanfaatan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah
2) Tingkatkan sistem informasi perencanaan dengan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah
3) Tingkatkan biaya operasional dan optimalkan penggunaan prasarana dan sarana
4) Terapkan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah (Pelayanan Publik).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional (seperti tersebut diatas) dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.

Adapunkebijakan nasional dan provinsi yang dimaksud sebagai berikut :

a. Kebijakan nasional : anggaran pendidikan 20%, anggaran kesehatan 10%, anggaran sanitasi 2%, penurunan gas emisi rumah kaca 46%, Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), MDGs, kebijakan ketersedian ruang terbuka hijau (RTH) 30%
b. Kebijakan Provinsi : 10 Common Goalds, kegiatan tematik kewilayahan, kegiatan sektoral, Jawa Barat satu data, Sinergitas perencanaan pembangunan Jawa Barat di Kota Bogor

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Berdasarkan visi Bappeda Kota Bogor"*Mewujudkan perencanaan yang berkelanjutan secara partisipatif, professional, dan bertanggungjawab* "dan misi Bappeda Kota Bogor,

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif.

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel.

maka tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda dari penjabaran misi, adalah:

MISI 1 Tujuan :

terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.Dengan indikator tujuan : Prosentase Keselarasan antara Program Pembangunan daerahdan RPJMD (jumlah indikator kinerja program pembangunan daerah yang menunjang sasaran RPJMD dibagi Jumlah seluruh indikator kinerja program pembangunan daerah X 100%)

Sasaran :

1. Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

   Indikator sasaran :

   - Prosentase Keselarasan antara Renstra/Renja Perangkat Daerah dengan RPJMD/RKPD

     Program pendukung :

     - Program Kerjasama Pembangunan Daerah

       Indikator Program :

       - Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP
       - Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR
     - Program Perencanaan Pembangunan Daerah

       Indikator Program :

       - Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD
       - Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD
       - Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD
       - Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD
       - Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD

perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP

- Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam Apersentase penerapan E planning, E Budgeting dan E MonevBD/APBDP

▪ Program Pengembangan Data dan Informasi

Indikator Program :

- Persentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik
- Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)
- Jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data

• Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (master plan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD

Program Pendukung :

▪ Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Indikator Program :

- Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD

▪ Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Indikator Program :

- Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD

▪ Program Perencanaan Tata Ruang

Indikator Program :

- Persentase konsistensi antara Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

  Indiaktor Program :

  - Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD

2. Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.

   Indikator sasaran :

   - Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target

     Program Pendukung :

     - Program Pengendalian Pembangunan Daerah

       Indikator Program :

       - Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target
       - Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target

   - Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target

     Program pendukung :

     - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

       Indikator Program :

       - Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang

MISI 2 Tujuan:

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yg berpihak kepada masyarakat, Dengan Indikator tujuan :Indeks kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perencanaan pembangunan daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

   Indikator sasaran :

- Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD

  Program pendung :

  - Program Perencanaan Pembangunan Daerah

    Indikator Program :

    - Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD
    - Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang
    - Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang
- Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota

  Program pendukung :

  - Program Penelitian dan Pengembangan

    Indikator Program :

    - Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir
    - Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota
    - Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat

MISI 3 Tujuan :

Terwujudnya perencanaan pembanguna daerah yang berbasis kinerja. Dengan Indikator tujuan:Nilai AKIP BAPPEDA

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilias kinerja perencanaan pembangunan daerah.

   Indikator sasaran :

   - Penilaian AKIP Bappeda
   - Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksanaan BPK, Inspektorat Propinsi, dan atau Inspektorat Kota

Program Pendukung :

- Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  Indikator Program :

  - Nilai LAKIP perangkat daerah
  - jumlah temuan atas rekomendasi hasol pemeriksanaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan pemeriksanaan X 100%
- Pelayanan administrasi perkantoran

  Indikator program :

  - Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah
- Peningkatan sarana prasarana aparatur

  Indikator Program :

  - Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur

3.3 Program dan Kegiatan Bappeda

Upaya untuk menghasilkan perencanaan yang lebih berkualitas dari tahun ke tahun telah ditempuh oleh Bappeda Kota Bogor, melibatkan seluruh stakeholders kota untuk menciptakan persamaan persepsi semua pihak yang terkait serta menggali kebutuhan warga dalam proses pembangunan sekaligus membuka partisipasi publik melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang juga telah menjadi agenda tetap Bappeda Kota Bogor.

Berdasarkan hasil penjaringan pada Forum konsultasi publik berupa Musrenbang ditambah dengan beberapa kebijakan Bappeda, telah menghasilkan beberapa prioritas program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor pada Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,dengan kegiatan ;
   - Pengelolaan Rumah Tangga OPD
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur,dengan kegiatan ;
   - Pengadaan Inventaris Kantor
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor

3. Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, **dengan kegiatan :**
   - **Penyusunan Perencanaan & Pelaporan OPD**
4. Program Perencanaan Tata Ruang
   - **Penyusunan PERDA Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor**
5. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam
   - **Revieu Masterplan Drainase (lanjutan)**
   - **Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup**
6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang,**dengan kegiatan :**
   - **Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD**
7. Program Pengendalian Pembangunan Daerah,**dengan kegiatan :**
   - **Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**
   - **Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan lingkup bidang fisik dan prasana**
   - **Penyelenggaraan perencanaan sarana prasarana kota**
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah,**dengan kegiatan :**
   - **Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A. 2019 serta Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan T.A. 2018**
   - **Pengkajian RKA SKPD TA.2018 dan DPPA SKPD T.A. 2017**
   - **Penyusunan RKPD Tahun 2019**
   - **Perencanaan Umum**
   - **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota**
   - **Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan**
   - **Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan**
   - **Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)**
9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, **dengan kegiatan :**
   - **Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Penelitian Pengembangan .**
10. Program Pengembangan Data dan Informasi,**dengan kegiatan :**
    - **Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogordan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik.**
11. Program Perencanaan Sosial Budaya,**dengan kegiatan :**

- Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan
- Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya

12. Program Penelitian Pengembangan,dengan kegiatan :

- Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2018

13. Program Pembangunan Kerjasama

- Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan di daerah kota bogor

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menerangkan bahwa OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2018, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda pada Tahun 2018 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bappeda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders,* serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bappeda Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA BOGOR

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				OPD	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp	Sumber Dana			
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
A	**URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**								
a	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD (Honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan, Alat listrik & elektronik, Peralatan kebersihan , Biaya telepon, Surat Kabar, Mamin, Perjadin, BBM, PDH) (Bulan)**	**Kota Bogor**	**100%**		**APBD Kota Bogor**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Persentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD	Kota Bogor	100%	1.100.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
b	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Jumlah dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)**	**Kota Bogor**	**100**		**APBD Kota Bogor**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
2	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Jumlah dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD, EPPD)	Kota Bogor	5 Dokumen	50.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
c	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%)**	**Kota Bogor**	**100**		**APBD Kota Bogor**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
3	Pengadaan Inventaris Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Operasional OPD	Kota Bogor	100%	1.085.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
4	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional OPD	Kota Bogor	100%, 12 bulan	1.510.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
d	**Program Penelitian Pengembangan**	**Ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan (%)**	**Kota Bogor**	**100**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
5	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2018	Jumlah Kawasan Perdagangan dan Jasa Unggulan di Kota Bogor yang dapat diidentifikasi	Kota Bogor	1 dokumen	650.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
B	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
e	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang**	**Kota Bogor**	**60**					
6	Penyusunan PERDA Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor	Jumlah dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah kota bogor (RTRW)	Kota Bogor	1 dokumen	350.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
f	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**Persentase keterlaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang**	**Kota Bogor**	**60**		**APBD Kota Bogor**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				OPD	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp	Sumber Dana			
7	Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang	Kota Bogor	1 dokumen kebijakan penyelenggaraan ruang	350.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
C	**URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**								
g	**Program Perencanaan Prasarana wilayah dan SDA**	**Jumlah dokumen perencanaan sarana prasarana perkotaan**	**Kota Bogor**	**4 dokumen**		**APBD Kota Bogor**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1 Dokumen**	
8	Review Masterplan Drainase (Lanjutan)	Jumlah dokumen masterplan drainase (lanjutan)	Kota Bogor	1 Dokumen (6 zona)	675.000.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
9	Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pengembangan strategi pembangunan kota rendah emisi	Kota Bogor	1 dokumen	150.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Terfasilitasi bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup, pengumpulan data dan koordinasi lingkungan hidup	Kota Bogor	2 Kali		APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
10	Review Masterplan Air Limbah	Jumlah dokumen perencanaan untuk pembangunan/perbaikan sarana air limbah	Kota Bogor	1 dokumen	600.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
h	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tingkat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah(%)**	**Kota Bogor**	**60**		**APBD Kota Bogor**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		**1.096.000.000**
11	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota	Monitoing Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Kota Bogor	100%	900.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Pelaksanaan Forum OPD, Musrenbang Kota dan Pameran Pembangunan	Kota Bogor	1 Dokumen; 20 Buku					
		Keikutsertaan Musrenbang Provinsi dan Nasional							
12	Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2019 serta Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan T.A 2018	jumlah dokumen KUA Tahun 2019	Kota Bogor	1 dokumen	500.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	600.000.000
		Jumlah dokumen PPAS Tahun 2019		1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah dokumen KUPA Tahun 2018		1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah dokumen PPASP Tahun 2018		1 dokumen				1 dokumen	
13	Pengkajian RKA SKPD T.A 2018 dan DPPA SKPD T.A 2017	Jumlah asistensi RKA OPD Tahun 2019	Kota Bogor	1 Kali	400.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kali	496.000.000
		Jumlah RKA OPD Tahun 2019		1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah asistensi DPPA OPD Tahun 2018		1 Kali				1 Kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				OPD	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp	Sumber Dana			
		Jumlah dokumen DPPA OPD Tahun 2018		1 Dokumen				1 Dokumen	
14	Penyusunan RKPD Tahun 2019	Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	Kota Bogor	1 dokumen;	470.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019	Kota Bogor	1 dokumen;					
		Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2018	Kota Bogor	1 dokumen;					
		Jumlah dokumen pengesahan Renja OPD Tahun 2019	Kota Bogor	1 Dokumen;					
15	Perencanaan Umum	Persentase Terlaksananya Tugas-tugas Khusus yang tidak terencana dalam kegiatan	Kota Bogor	100 %	700.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Jumlah Koordinasi ke Provinsi dan Pusat	Kota Bogor	12 bulan					
16	Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan	Meningkatnya Pelaksanaan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	12 Bulan	700.000.000				
17	Penyusunan Prosedur Perencanaan Teknis	Jumlah buku panduan prosedur untuk perencanaan teknis	Kota Bogor	1 dokumen	100.000.000				
18	Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	Kota Bogor	1 Dokumen	200.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
19	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)	Kota Bogor	1 dokumen	200.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Jumlah pelaksana terlatih Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)		1 Kali pelatihan					
		Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)		1 aplikasi					
20	Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	Kota Bogor	1 Dokumen	200.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
i	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**Tingkat penyusunan dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi**	**-**	**60**		**APBD Kota Bogor**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
21	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Penelitian Pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi penelitian dan pengembangan Kota Bogor	Kota Bogor	1 dokumen	200.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
22	Profil Perekonomian Kota Bogor Tahun 2018	Jumlah dokumen data perekonomian Kota Bogor sebagai bahan pengambilan kebijakan	Kota Bogor	1 Dokumen	350.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
j	**Program Kerjasama Pembangunan**								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				OPD	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp	Sumber Dana			
23	Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor	Meningkatnya peran serta swasta/BUMN/BUMD dalam kegiatan pembangunan daerah Kota Bogor melalui TJSL/CSR	Kota Bogor	2 dokumen	200.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Jumlah program pembangunan Kota Bogor yang dapat dilakukan melalui TJSL/CSR		2 kegiatan					
k	**Program Pengembangan Data dan Informasi**	**Tingkat ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan(%)**	**Kota Bogor**	**60**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
24	Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	Jumlah dokumen data Kota Bogor Dalam Angka (BDA) tahun 2018	Kota Bogor	1 Dokumen	250.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Jumlah isian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Kota Bogor	1 Aplikasi SIPD					
		Jumlah Buku SIPD	Kota Bogor	1 Dokumen					
25	Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota	Jumlah Laporan Hasil Sarana Prasarana Permukiman Berbasis Aplikasi	Kota Bogor		0	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen laporan 4 SKPD teknis	350.000.000
l	**Program Pengendalian Pembangunan**								
26	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Lingkup Bidang Ekonomi dan Litbang	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi dan Litbang	Kota Bogor	2 Dokumen	100.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Tersusunnya Dokumen Hasil Monev Lingkup Bidang Ekonomi dan Litbang		4 Dokumen			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
27	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun 2017 semester II	Kota Bogor	2 dokumen	250.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 semester I		4 Dokumen			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Jumlah buku Analisa Evaluasi		4 Dokumen			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi Monev 2018		1 pelaksanaan					
28	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Fisik	Kota Bogor	1 Dokumen	175.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	175.000.000
		Tersusunnya Dokumen Hasil Monev Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana	Kota Bogor	4 Dokumen			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
29	Penyelenggaraan Perencanaan Sarana Prasarana Kota	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Sarana Prasarana Kota (Pokja Sanitasi, Pokja RPIJM, Pokja Perkim)	Kota Bogor	3 dokumen laporan	350.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				OPD	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp	Sumber Dana			
m	**Program Perencanaan Sosial Budaya**	**Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Sosial Budaya (%)**	**Kota Bogor**	**60**			**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		
30	Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pemberdayaan	Kota Bogor	1 Dokumen	700.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
31	Perencanaan Pembangunan subid Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kota Bogor	1 Dokumen	500.000.000	APBD Kota Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF					***13.965.000.000***				**1.096.000.000**